PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144
Telepon (024) 76008247 Faksimile (024) 7608202
Laman https://www.disperakim.jatengprov.go.id , Pos-el disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Yth.	:	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Dari	:	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tembusan	:	-
Tanggal	:	31 Agustus 2026
Nomor	:	085/KEU/VIII/2026
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	-
Hal	:	Permohonan Asmanan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2026 Bulan Agustus

Berikut kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Bulan Agustus.

Bersama ini mohon dengan hormat asmanan Bapak untuk Laporan tersebut (terlampir).

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Muslichah Setiasih, S.IP, MMG, M.Eng
Pembina
NIP. 19800901 201001 2 018

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

BULAN AGUSTUS

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Bulan Agustus pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Agustus 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Boedyo Dharmawan, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 199803 1 003

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2026 bulan Agustus sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, Agustus 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Boedyo Dharmawan, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 199803 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntanbilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sistematis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntanbilitas
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen
   Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan
   Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.31/508 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2026 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja Murni sebesar Rp. 39.810.871.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 39.495.871.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 315.000.000,- dan menjadi Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp. 39.110.989.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 38.796.129.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 314.860.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 19 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Tujuan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah **"Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Lestari"** dengan 4 (empat) sasaran yaitu :

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis
2. Perekonomian Tangguh yang Berdaya saing dan Berkelanjutan
3. SDM Berdaya Saing, Berkarakter dan Adaptif
4. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Gubernur pada periode perencanaan jangka menengah transisi 2024-2026 serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Kawasan Permukiman;
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
4. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;

5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
6. Program Redistrubusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2026

periode 1 Januari s.d 31 Agustus 2026

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	**BELANJA DAERAH**	**39.110.989.000**	**23.833.779.735**	**60,94**	**15.277.209.265**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**38.796.129.000**	**23.682.011.175**	**61,04**	**15.114.117.825**
5.1.1	Belanja Pegawai	13.368.944.000	8.418.664.017	62,97	4.950.279.983
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.039.412.000	4.012.344.016	66,44	2.027.067.984
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.455.700.000	2.984.467.169	66,98	1.471.232.831
5.1.1.1.1.1	**Belanja Gaji Pokok PNS**	**3.638.000.000**	**2.413.188.300**	**66,33**	**1.224.811.700**
5.1.1.1.1.2	**Belanja Gaji Pokok PPPK**	**817.700.000**	**571.278.869**	**69,86**	**246.421.131**
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	381.000.000	260.043.827	68,25	120.956.173
5.1.1.1.2.1	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**	**343.500.000**	**233.956.210**	**68,11**	**109.543.790**
5.1.1.1.2.2	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**	**37.500.000**	**26.087.617**	**69,57**	**11.412.383**
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	176.540.000	121.240.000	68,68	55.300.000
5.1.1.1.3.1	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**	**176.540.000**	**121.240.000**	**68,68**	**55.300.000**
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	135.500.000	87.765.000	64,77	47.735.000
5.1.1.1.4.1	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**	**100.000.000**	**62.665.000**	**62,67**	**37.335.000**
5.1.1.1.4.2	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**	**35.500.000**	**25.100.000**	**70,70**	**10.400.000**
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	85.500.000	57.450.000	67,19	28.050.000
5.1.1.1.5.1	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**	**85.500.000**	**57.450.000**	**67,19**	**28.050.000**
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	220.000.000	149.305.900	67,87	70.694.100
5.1.1.1.6.1	**Belanja Tunjangan Beras PNS**	**185.000.000**	**127.024.680**	**68,66**	**57.975.320**
5.1.1.1.6.2	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**	**35.000.000**	**22.281.220**	**63,66**	**12.718.780**
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	96.800.000	90.105.991	93,08	6.694.009
5.1.1.1.7.1	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**	**96.800.000**	**90.105.991**	**93,08**	**6.694.009**
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	400.000	42.055	10,51	357.945
5.1.1.1.8.1	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**	**300.000**	**34.369**	**11,46**	**265.631**
5.1.1.1.8.2	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**	**100.000**	**7.686**	**7,69**	**92.314**
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	380.000.000	238.942.983	62,88	141.057.017
5.1.1.1.9.1	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**	**335.000.000**	**212.371.379**	**63,39**	**122.628.621**
5.1.1.1.9.2	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**	**45.000.000**	**26.571.604**	**59,05**	**18.428.396**
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.500.000	5.745.239	60,48	3.754.761
5.1.1.1.10.1	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**	**7.500.000**	**4.638.359**	**61,84**	**2.861.641**
5.1.1.1.10.2	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**	**2.000.000**	**1.106.880**	**55,34**	**893.120**
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.000.000	17.235.852	63,84	9.764.148

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.1.11.1	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**	**22.000.000**	**13.915.340**	**63,25**	**8.084.660**
5.1.1.1.11.2	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**	**5.000.000**	**3.320.512**	**66,41**	**1.679.488**
5.1.1.1.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	71.472.000	0	0	71.472.000
5.1.1.1.12.1	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**	**56.684.000**	**0**	**0**	**56.684.000**
5.1.1.1.12.2	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK**	**14.788.000**	**0**	**0**	**14.788.000**
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.329.532.000	4.406.320.001	60,12	2.923.211.999
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.329.532.000	4.406.320.001	60,12	2.923.211.999
5.1.1.2.1.1	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**	**6.989.532.000**	**4.230.820.001**	**60,53**	**2.758.711.999**
5.1.1.2.1.2	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**	**340.000.000**	**175.500.000**	**51,62**	**164.500.000**
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.427.185.000	8.449.347.158	54,77	6.977.837.842
5.1.2.1	Belanja Barang	6.412.079.000	2.555.108.321	39,85	3.856.970.679
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	6.310.407.000	2.476.198.321	39,24	3.834.208.679
5.1.2.1.1.4	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**	**100.000.000**	**60.880.000**	**60,88**	**39.120.000**
5.1.2.1.1.9	**Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran**	**3.000.000**	**3.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.1.12	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**	**52.730.000**	**52.680.000**	**99,91**	**50.000**
5.1.2.1.1.24	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**	**241.682.500**	**204.365.090**	**84,56**	**37.317.410**
5.1.2.1.1.26	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak**	**327.295.500**	**237.989.300**	**72,71**	**89.306.200**
5.1.2.1.1.27	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**	**11.800.000**	**11.800.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.1.31	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**	**33.000.000**	**33.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.1.35	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata**	**13.842.000**	**7.242.000**	**52,32**	**6.600.000**
5.1.2.1.1.36	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.1.39	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**	**208.000.000**	**183.210.000**	**88,08**	**24.790.000**
5.1.2.1.1.40	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**	**3.487.698.000**	**708.283.951**	**20,31**	**2.779.414.049**
5.1.2.1.1.52	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**	**1.787.121.000**	**953.635.980**	**53,36**	**833.485.020**
5.1.2.1.1.53	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**	**32.738.000**	**10.112.000**	**30,89**	**22.626.000**
5.1.2.1.1.64	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**	**1.500.000**	**0**	**0**	**1.500.000**
5.1.2.1.4	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	101.672.000	78.910.000	77,61	22.762.000
5.1.2.1.4.117	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat**	**16.702.000**	**12.965.000**	**77,63**	**3.737.000**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Kantor Lainnya				
5.1.2.1.4.137	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya**	**24.970.000**	**24.970.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.4.411	**Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**	**60.000.000**	**40.975.000**	**68,29**	**19.025.000**
5.1.2.2	Belanja Jasa	6.374.260.000	3.998.031.199	62,72	2.376.228.801
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	5.192.588.000	3.268.508.513	62,95	1.924.079.487
5.1.2.2.1.3	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**	**608.110.000**	**320.775.000**	**52,75**	**287.335.000**
5.1.2.2.1.4	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**	**17.100.000**	**8.550.000**	**50**	**8.550.000**
5.1.2.2.1.6	**Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**	**2.500.000**	**0**	**0**	**2.500.000**
5.1.2.2.1.25	**Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan**	**7.200.000**	**300.000**	**4,17**	**6.900.000**
5.1.2.2.1.29	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**	**1.172.313.000**	**741.253.792**	**63,23**	**431.059.208**
5.1.2.2.1.30	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**	**552.500.000**	**379.788.480**	**68,74**	**172.711.520**
5.1.2.2.1.31	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**	**709.800.000**	**492.339.140**	**69,36**	**217.460.860**
5.1.2.2.1.33	**Belanja Jasa Tenaga Supir**	**50.700.000**	**35.031.962**	**69,10**	**15.668.038**
5.1.2.2.1.34	**Belanja Jasa Tenaga Juru Masak**	**101.400.000**	**70.080.820**	**69,11**	**31.319.180**
5.1.2.2.1.46	**Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi**	**150.000.000**	**49.448.000**	**32,97**	**100.552.000**
5.1.2.2.1.59	**Belanja Tagihan Telepon**	**52.500.000**	**29.309.472**	**55,83**	**23.190.528**
5.1.2.2.1.60	**Belanja Tagihan Air**	**24.000.000**	**13.824.286**	**57,60**	**10.175.714**
5.1.2.2.1.61	**Belanja Tagihan Listrik**	**423.500.000**	**225.411.033**	**53,23**	**198.088.967**
5.1.2.2.1.67	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**	**31.050.000**	**22.615.500**	**72,84**	**8.434.500**
5.1.2.2.1.80	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**	**378.000.000**	**230.800.000**	**61,06**	**147.200.000**
5.1.2.2.1.81	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**	**8.000.000**	**4.000.000**	**50**	**4.000.000**
5.1.2.2.1.90	**Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional**	**903.915.000**	**644.981.028**	**71,35**	**258.933.972**
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	155.000.000	0	0	155.000.000
5.1.2.2.2.8	**Belanja Asuransi Barang Milik Daerah**	**155.000.000**	**0**	**0**	**155.000.000**
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.000.000	0	0	30.000.000
5.1.2.2.4.36	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**	**30.000.000**	**0**	**0**	**30.000.000**
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	44.000.000	43.830.400	99,61	169.600
5.1.2.2.5.25	**Belanja Sewa Bangunan Terbuka**	**44.000.000**	**43.830.400**	**99,61**	**169.600**
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	455.672.000	200.882.026	44,08	254.789.974

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.8.9	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi**	**258.698.000**	**200.882.026**	**77,65**	**57.815.974**
5.1.2.2.8.20	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi**	**196.974.000**	**0**	**0**	**196.974.000**
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	490.000.000	484.810.260	98,94	5.189.740
5.1.2.2.9.14	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**	**490.000.000**	**484.810.260**	**98,94**	**5.189.740**
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.000.000	0	0	7.000.000
5.1.2.2.12.1	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**	**7.000.000**	**0**	**0**	**7.000.000**
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	491.145.000	373.918.145	76,13	117.226.855
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	291.145.000	193.848.680	66,58	97.296.320
5.1.2.3.2.22	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set**	**14.500.000**	**7.560.000**	**52,14**	**6.940.000**
5.1.2.3.2.23	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa**	**5.300.000**	**0**	**0**	**5.300.000**
5.1.2.3.2.36	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**	**258.345.000**	**173.308.680**	**67,08**	**85.036.320**
5.1.2.3.2.118	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel**	**13.000.000**	**12.980.000**	**99,85**	**20.000**
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000	180.069.465	90,03	19.930.535
5.1.2.3.3.1	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**	**200.000.000**	**180.069.465**	**90,03**	**19.930.535**
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	2.149.701.000	1.522.289.493	70,81	627.411.507
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.149.701.000	1.522.289.493	70,81	627.411.507
5.1.2.4.1.1	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**	**2.149.701.000**	**1.522.289.493**	**70,81**	**627.411.507**
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000	6.814.000.000	68,14	3.186.000.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	10.000.000.000	6.814.000.000	68,14	3.186.000.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	10.000.000.000	6.814.000.000	68,14	3.186.000.000
5.1.6.1.2.1	**Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**	**10.000.000.000**	**6.814.000.000**	**68,14**	**3.186.000.000**
5.2	**BELANJA MODAL**	**314.860.000**	**151.768.560**	**48,20**	**163.091.440**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.860.000	64.860.000	100	0
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	49.920.000	49.920.000	100	0
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	49.920.000	49.920.000	100	0
5.2.2.5.2.4	**Belanja Modal Alat Pendingin**	**49.920.000**	**49.920.000**	**100**	**0**
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	14.940.000	14.940.000	100	0
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.940.000	14.940.000	100	0

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.2.10.2.4	**Belanja Modal Peralatan Jaringan**	**14.940.000**	**14.940.000**	**100**	**0**
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000	86.908.560	34,76	163.091.440
5.2.6.1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	250.000.000	86.908.560	34,76	163.091.440
5.2.6.1.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	250.000.000	86.908.560	34,76	163.091.440
5.2.6.1.1.5	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software**	**250.000.000**	**86.908.560**	**34,76**	**163.091.440**
	Jumlah Belanja	**39.110.989.000**	**23.833.779.735**	**60,94**	**15.277.209.265**
	Surplus/(Defisit)	**0**	**(23.833.779.735)**	**100**	**23.833.779.735**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**	**(23.833.779.735)**	**100**	**23.833.779.735**

Semarang, 31 Agustus 2026

PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(MUSLICHAH SETIASIH, M.Eng., MMG, S.IP)

NIP. 19800901 201001 2 018

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 39.810.871.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 39.495.871.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 315.000.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Anggaran Belanja Perubahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 39.110.989.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 38.796.129.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 314.860.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 13.368.944.000,- dan realisasi sebesar Rp. 8.418.664.017,- dengan Presentasi 62.97 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 15.427.185.000,- dan realisasi sebesar Rp. 8.449.347.158,- dengan Presentasi 54.77 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.814.000.000,- dengan Presentasi 68.14 %.

Belanja Modal *:*

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 314.860.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 151.768.560,- dengan Presentasi 48.20 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 64.860.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 64.860.000,- dengan Presentasi 100 %; dan Belanja Modal Aset Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 86.908.560,- dengan Presentasi 34.76 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut, strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Fungsi :

Sub Fungsi :

Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	**39.110.989.000**	**23.833.779.735**	**15.277.209.265**	**60,94**
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**	**19.287.148.000**	**12.107.279.893**	**7.179.868.107**	**62,77**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**687.578.000**	**295.812.230**	**391.765.770**	**43,02**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	407.873.000	142.142.780	265.730.220,00	34,85
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	254.523.000	143.132.450	111.390.550,00	56,24
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	12.591.000	6.991.000	5.600.000,00	55,52
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12.591.000	3.546.000	9.045.000,00	28,16
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**13.834.827.000**	**8.715.620.317**	**5.119.206.683**	**63,00**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	13.368.944.000	8.418.664.017	4.950.279.983,00	62,97
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	386.000.000	234.800.000	151.200.000,00	60,83
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.968.000	39.463.700	5.504.300,00	87,76
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.521.000	4.497.600	23.400,00	99,48
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunanan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	26.200.000	14.043.000	12.157.000,00	53,60
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.194.000	4.152.000	42.000,00	99,00
	Kegiatan Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**167.520.000**	**7.418.000**	**160.102.000**	**4**
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.174.000	2.409.000	1.765.000,00	57,71
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	-	155.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.173.000	3.060.000	1.113.000,00	73,33
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4.173.000	1.949.000	2.224.000,00	46,71
	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**59.178.000**	**34.240.900**	**24.937.100**	**57,8608605**
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.793.000	8.600.000	193.000,00	97,81
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13.080.000	10.650.000	2.430.000,00	81,42
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	-	10.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11.641.000	-	11.641.000,00	-
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.664.000	14.990.900	673.100,00	95,70
	Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	**1.018.803.000**	**617.818.580**	**400.984.420**	**60,64**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	33.000.000	33.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000	28.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.000.000	13.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	60.880.000	39.120.000,00	60,88
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.018.000	10.018.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.738.000	12.512.000	63.226.000,00	16,52
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550.969.000	306.060.180	244.908.820,00	55,55
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	17.210.000	17.210.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	190.868.000	137.138.400	53.729.600,00	71,85
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**89.830.000**	**89.830.000**	**-**	**100**
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.830.000	89.830.000	-	100,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2.830.515.000**	**1.896.066.221**	**934.448.779**	**66,99**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000	268.544.791	231.455.209,00	53,71
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.325.515.000	1.622.521.430	702.993.570,00	69,77
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**598.897.000**	**450.473.645**	**148.423.355**	**75**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.395.000	46.951.037	42.443.963,00	52,52
	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	148.973.143	51.026.857,00	74,49
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	13.000.000	12.980.000	20.000,00	99,85
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	40.975.000	19.025.000,00	68,29
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	180.069.465	19.930.535,00	90,03
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.502.000	20.525.000	15.977.000,00	56,23

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
II.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**12.634.852.000**	**8.450.782.022**	**4.184.069.978**	**66,88**
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**148.772.000**	**96.529.055**	**52.242.945**	**64,88**
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	104.754.000	64.546.360	40.207.640,00	61,62
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	44.018.000	31.982.695	12.035.305,00	72,66
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**100.908.000**	**60.386.850**	**40.521.150**	**59,84**
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarekawan Tanggap Bencana	100.908.000	60.386.850	40.521.150,00	59,84
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**10.884.280.000**	**7.387.102.809**	**3.497.177.191**	**67,87**
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.622.963.000	1.403.163.282	219.799.718,00	86,46
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	3.984.304.000	946.240.281	3.038.063.719,00	23,75
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang terdampak Relokasi Program Provinsi	5.277.013.000	5.037.699.246	239.313.754,00	95,46
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**1.500.892.000**	**906.763.308**	**594.128.692**	**60,41**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Provinsi	1.500.892.000	906.763.308	594.128.692,00	60,41
III.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.968.241.000**	**738.533.372**	**1.229.707.628**	**37,52**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**141.352.000**	**91.878.282**	**49.473.718**	**65,00**
	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	141.352.000	91.878.282	49.473.718,00	65,00
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**1.826.889.000**	**646.655.090**	**1.180.233.910**	**35,40**
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	12.777.000	10.226.500	2.550.500,00	80,04
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	162.832.000	139.900.060	22.931.940,00	85,92
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	1.651.280.000	496.528.530	1.154.751.470,00	30,07
IV.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**2.652.532.000**	**771.133.147**	**1.881.398.853**	**29,07**
	Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Permukiman	**2.652.532.000**	**771.133.147**	**1.881.398.853**	**29,07**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	21.692.000	15.510.000	6.182.000,00	71,50
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	2.630.840.000	755.623.147	1.875.216.853,00	28,72
V.	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**237.960.000**	**138.705.500**	**99.254.500**	**58,29**
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	**237.960.000**	**138.705.500**	**99.254.500**	**58,29**
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	237.960.000	138.705.500	99.254.500,00	58,29
VI.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**458.084.000**	**302.627.000**	**155.457.000**	**66,06**
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**458.084.000**	**302.627.000**	**155.457.000**	**66,06**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	346.105.000	228.929.000	117.176.000,00	66,14
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	111.979.000	73.698.000	38.281.000,00	65,81
VII.	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**392.099.000**	**232.887.500**	**159.211.500**	**59,40**
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupataen/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**392.099.000**	**232.887.500**	**159.211.500**	**59,40**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	334.671.000	196.526.500	138.144.500,00	58,72
	Sub Kegiatan Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	57.428.000	36.361.000	21.067.000,00	63,32

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
VIII.	**PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**323.099.000**	**216.018.659**	**107.080.341**	**66,86**
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Ulitilas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	**323.099.000**	**216.018.659**	**107.080.341**	**66,86**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkonisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kialifikasi Menengah	323.099.000	216.018.659	107.080.341,00	66,86
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**1.156.974.000**	**875.812.642**	**281.161.358**	**75,70**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**1.156.974.000**	**875.812.642**	**281.161.358**	**75,70**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	713.191.000	586.000.942	127.190.058,00	82,17
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	443.783.000	289.811.700	153.971.300,00	65,30
	JUMLAH	**39.110.989.000**	**23.833.779.735**	**15.277.209.265**	**60,94**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144
Telepon (024) 76008247 Faksimile (024) 7608202
Laman https://www.disperakim.jatengprov.go.id , Pos-el disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Yth.	:	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Dari	:	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tembusan	:	-
Tanggal	:	6 Agustus 2026
Nomor	:	078/KEU/VIII/2026
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	-
Hal	:	Permohonan Asmanan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2026 Bulan Juli

Berikut kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Bulan Juli.

Bersama ini mohon dengan hormat asmanan Bapak untuk Laporan tersebut (terlampir).

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Muslichah Setiasih, S.IP, MMG, M.Eng
Pembina
NIP. 19800901 201001 2 018



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

BULAN JULI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Bulan Juli pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Juli 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Boedyo Dharmawan, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 199803 1 003

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2026 bulan Juli sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, Juli 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Boedyo Dharmawan, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 199803 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntanbilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sistematis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntanbilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen

   Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan

   Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.31/508 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2026 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja Murni sebesar Rp. 39.810.871.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 39.495.871.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 315.000.000,- dan menjadi Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp. 39.110.989.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 38.796.129.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 314.860.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 19 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Tujuan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah **"Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Lestari"** dengan 4 (empat) sasaran yaitu :

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis
2. Perekonomian Tangguh yang Berdaya saing dan Berkelanjutan
3. SDM Berdaya Saing, Berkarakter dan Adaptif
4. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Gubernur pada periode perencanaan jangka menengah transisi 2024-2026 serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Kawasan Permukiman;
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
4. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;

5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
6. Program Redistrubusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2026
periode 1 Januari s.d 31 Juli 2026

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	**BELANJA DAERAH**	**39.110.989.000**	**20.927.302.978**	**53,51**	**18.183.686.022**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**38.796.129.000**	**20.775.534.418**	**53,55**	**18.020.594.582**
5.1.1	Belanja Pegawai	13.368.944.000	7.544.830.442	56,44	5.824.113.558
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.039.412.000	3.619.155.426	59,93	2.420.256.574
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.455.700.000	2.690.683.469	60,39	1.765.016.531
5.1.1.1.1.1	**Belanja Gaji Pokok PNS**	**3.638.000.000**	**2.177.276.200**	**59,85**	**1.460.723.800**
5.1.1.1.1.2	**Belanja Gaji Pokok PPPK**	**817.700.000**	**513.407.269**	**62,79**	**304.292.731**
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	381.000.000	234.311.059	61,50	146.688.941
5.1.1.1.2.1	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**	**343.500.000**	**210.864.298**	**61,39**	**132.635.702**
5.1.1.1.2.2	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**	**37.500.000**	**23.446.761**	**62,52**	**14.053.239**
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	176.540.000	109.170.000	61,84	67.370.000
5.1.1.1.3.1	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**	**176.540.000**	**109.170.000**	**61,84**	**67.370.000**
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	135.500.000	79.320.000	58,54	56.180.000
5.1.1.1.4.1	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**	**100.000.000**	**56.730.000**	**56,73**	**43.270.000**
5.1.1.1.4.2	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**	**35.500.000**	**22.590.000**	**63,63**	**12.910.000**
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	85.500.000	51.900.000	60,70	33.600.000
5.1.1.1.5.1	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**	**85.500.000**	**51.900.000**	**60,70**	**33.600.000**
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	220.000.000	134.532.220	61,15	85.467.780
5.1.1.1.6.1	**Belanja Tunjangan Beras PNS**	**185.000.000**	**114.496.020**	**61,89**	**70.503.980**
5.1.1.1.6.2	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**	**35.000.000**	**20.036.200**	**57,25**	**14.963.800**
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	96.800.000	89.732.966	92,70	7.067.034
5.1.1.1.7.1	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**	**96.800.000**	**89.732.966**	**92,70**	**7.067.034**
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	400.000	37.748	9,44	362.252
5.1.1.1.8.1	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**	**300.000**	**30.809**	**10,27**	**269.191**
5.1.1.1.8.2	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**	**100.000**	**6.939**	**6,94**	**93.061**
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	380.000.000	209.307.196	55,08	170.692.804
5.1.1.1.9.1	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**	**335.000.000**	**186.336.491**	**55,62**	**148.663.509**
5.1.1.1.9.2	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**	**45.000.000**	**22.970.705**	**51,05**	**22.029.295**
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.500.000	5.040.163	53,05	4.459.837
5.1.1.1.10.1	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**	**7.500.000**	**4.072.181**	**54,30**	**3.427.819**
5.1.1.1.10.2	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**	**2.000.000**	**967.982**	**48,40**	**1.032.018**
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.000.000	15.120.605	56	11.879.395
5.1.1.1.11.1	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**	**22.000.000**	**12.216.771**	**55,53**	**9.783.229**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.1.11.2	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**	**5.000.000**	**2.903.834**	**58,08**	**2.096.166**
5.1.1.1.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	71.472.000	0	0	71.472.000
5.1.1.1.12.1	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**	**56.684.000**	**0**	**0**	**56.684.000**
5.1.1.1.12.2	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK**	**14.788.000**	**0**	**0**	**14.788.000**
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.329.532.000	3.925.675.016	53,56	3.403.856.984
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.329.532.000	3.925.675.016	53,56	3.403.856.984
5.1.1.2.1.1	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**	**6.989.532.000**	**3.777.175.016**	**54,04**	**3.212.356.984**
5.1.1.2.1.2	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**	**340.000.000**	**148.500.000**	**43,68**	**191.500.000**
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.427.185.000	7.040.703.976	45,64	8.386.481.024
5.1.2.1	Belanja Barang	6.412.079.000	1.765.514.990	27,53	4.646.564.010
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	6.310.407.000	1.690.604.990	26,79	4.619.802.010
5.1.2.1.1.4	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**	**100.000.000**	**53.080.000**	**53,08**	**46.920.000**
5.1.2.1.1.9	**Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran**	**3.000.000**	**3.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.1.12	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**	**52.730.000**	**37.730.000**	**71,55**	**15.000.000**
5.1.2.1.1.24	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**	**241.682.500**	**193.874.110**	**80,22**	**47.808.390**
5.1.2.1.1.26	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**	**327.295.500**	**227.219.900**	**69,42**	**100.075.600**
5.1.2.1.1.27	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**	**11.800.000**	**11.800.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.1.31	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**	**33.000.000**	**33.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.1.35	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**	**13.842.000**	**7.242.000**	**52,32**	**6.600.000**
5.1.2.1.1.36	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.1.39	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**	**208.000.000**	**183.210.000**	**88,08**	**24.790.000**
5.1.2.1.1.40	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**	**3.487.698.000**	**76.200.000**	**2,18**	**3.411.498.000**
5.1.2.1.1.52	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**	**1.787.121.000**	**844.136.980**	**47,23**	**942.984.020**
5.1.2.1.1.53	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**	**32.738.000**	**10.112.000**	**30,89**	**22.626.000**
5.1.2.1.1.64	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**	**1.500.000**	**0**	**0**	**1.500.000**
5.1.2.1.4	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	101.672.000	74.910.000	73,68	26.762.000
5.1.2.1.4.117	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**	**16.702.000**	**12.965.000**	**77,63**	**3.737.000**
5.1.2.1.4.137	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-**	**24.970.000**	**24.970.000**	**100**	**0**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Alat Studio Lainnya				
5.1.2.1.4.411	**Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**	**60.000.000**	**36.975.000**	**61,63**	**23.025.000**
5.1.2.2	Belanja Jasa	6.374.260.000	3.593.532.818	56,38	2.780.727.182
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	5.192.588.000	2.869.010.132	55,25	2.323.577.868
5.1.2.2.1.3	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**	**608.110.000**	**281.100.000**	**46,23**	**327.010.000**
5.1.2.2.1.4	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**	**17.100.000**	**8.550.000**	**50**	**8.550.000**
5.1.2.2.1.6	**Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**	**2.500.000**	**0**	**0**	**2.500.000**
5.1.2.2.1.25	**Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan**	**7.200.000**	**300.000**	**4,17**	**6.900.000**
5.1.2.2.1.29	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**	**1.172.313.000**	**677.883.225**	**57,82**	**494.429.775**
5.1.2.2.1.30	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**	**552.500.000**	**336.634.920**	**60,93**	**215.865.080**
5.1.2.2.1.31	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**	**709.800.000**	**438.054.940**	**61,72**	**271.745.060**
5.1.2.2.1.33	**Belanja Jasa Tenaga Supir**	**50.700.000**	**31.122.013**	**61,38**	**19.577.987**
5.1.2.2.1.34	**Belanja Jasa Tenaga Juru Masak**	**101.400.000**	**62.258.810**	**61,40**	**39.141.190**
5.1.2.2.1.46	**Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi**	**150.000.000**	**0**	**0**	**150.000.000**
5.1.2.2.1.59	**Belanja Tagihan Telepon**	**52.500.000**	**28.421.224**	**54,14**	**24.078.776**
5.1.2.2.1.60	**Belanja Tagihan Air**	**24.000.000**	**13.416.444**	**55,90**	**10.583.556**
5.1.2.2.1.61	**Belanja Tagihan Listrik**	**423.500.000**	**195.376.316**	**46,13**	**228.123.684**
5.1.2.2.1.67	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**	**31.050.000**	**20.070.500**	**64,64**	**10.979.500**
5.1.2.2.1.80	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**	**378.000.000**	**201.950.000**	**53,43**	**176.050.000**
5.1.2.2.1.81	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**	**8.000.000**	**4.000.000**	**50**	**4.000.000**
5.1.2.2.1.90	**Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional**	**903.915.000**	**569.871.740**	**63,04**	**334.043.260**
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	155.000.000	0	0	155.000.000
5.1.2.2.2.8	**Belanja Asuransi Barang Milik Daerah**	**155.000.000**	**0**	**0**	**155.000.000**
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.000.000	0	0	30.000.000
5.1.2.2.4.36	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**	**30.000.000**	**0**	**0**	**30.000.000**
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	44.000.000	38.830.400	88,25	5.169.600
5.1.2.2.5.25	**Belanja Sewa Bangunan Terbuka**	**44.000.000**	**38.830.400**	**88,25**	**5.169.600**
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	455.672.000	200.882.026	44,08	254.789.974
5.1.2.2.8.9	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi**	**258.698.000**	**200.882.026**	**77,65**	**57.815.974**
5.1.2.2.8.20	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi**	**196.974.000**	**0**	**0**	**196.974.000**
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	490.000.000	484.810.260	98,94	5.189.740

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.9.14	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**	**490.000.000**	**484.810.260**	**98,94**	**5.189.740**
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.000.000	0	0	7.000.000
5.1.2.2.12.1	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**	**7.000.000**	**0**	**0**	**7.000.000**
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	491.145.000	328.244.070	66,83	162.900.930
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	291.145.000	171.698.570	58,97	119.446.430
5.1.2.3.2.22	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set**	**14.500.000**	**7.560.000**	**52,14**	**6.940.000**
5.1.2.3.2.23	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa**	**5.300.000**	**0**	**0**	**5.300.000**
5.1.2.3.2.36	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**	**258.345.000**	**151.158.570**	**58,51**	**107.186.430**
5.1.2.3.2.118	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel**	**13.000.000**	**12.980.000**	**99,85**	**20.000**
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000	156.545.500	78,27	43.454.500
5.1.2.3.3.1	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**	**200.000.000**	**156.545.500**	**78,27**	**43.454.500**
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	2.149.701.000	1.353.412.098	62,96	796.288.902
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.149.701.000	1.353.412.098	62,96	796.288.902
5.1.2.4.1.1	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**	**2.149.701.000**	**1.353.412.098**	**62,96**	**796.288.902**
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000	6.190.000.000	61,90	3.810.000.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	10.000.000.000	6.190.000.000	61,90	3.810.000.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	10.000.000.000	6.190.000.000	61,90	3.810.000.000
5.1.6.1.2.1	**Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**	**10.000.000.000**	**6.190.000.000**	**61,90**	**3.810.000.000**
5.2	**BELANJA MODAL**	**314.860.000**	**151.768.560**	**48,20**	**163.091.440**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.860.000	64.860.000	100	0
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	49.920.000	49.920.000	100	0
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	49.920.000	49.920.000	100	0
5.2.2.5.2.4	**Belanja Modal Alat Pendingin**	**49.920.000**	**49.920.000**	**100**	**0**
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	14.940.000	14.940.000	100	0
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.940.000	14.940.000	100	0
5.2.2.10.2.4	**Belanja Modal Peralatan Jaringan**	**14.940.000**	**14.940.000**	**100**	**0**
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000	86.908.560	34,76	163.091.440
5.2.6.1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	250.000.000	86.908.560	34,76	163.091.440
5.2.6.1.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	250.000.000	86.908.560	34,76	163.091.440
5.2.6.1.1.5	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software**	**250.000.000**	**86.908.560**	**34,76**	**163.091.440**
	Jumlah Belanja	**39.110.989.000**	**20.927.302.978**	**53,51**	**18.183.686.022**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Surplus/(Defisit)	**0**	**(20.927.302.978)**	**100**	**20.927.302.978**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**	**(20.927.302.978)**	**100**	**20.927.302.978**

Semarang, 31 Juli 2026

PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(MUSLICHAH SETIASIH, M.Eng., MMG, S.IP)

NIP. 19800901 201001 2 018

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 39.810.871.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 39.495.871.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 315.000.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Anggaran Belanja Perubahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 39.110.989.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 38.796.129.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 314.860.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 13.368.944.000,- dan realisasi sebesar Rp. 7.544.830.442,- dengan Presentasi 56.44 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 15.427.185.000,- dan realisasi sebesar Rp. 7.040.703.976,- dengan Presentasi 45.64 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.190.000.000,- dengan Presentasi 61.90 %.

Belanja Modal *:*

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 314.860.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 151.768.560,- dengan Presentasi 48.20 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 64.860.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 64.860.000,- dengan Presentasi 100 %; dan Belanja Modal Aset Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 86.908.560,- dengan Presentasi 34.76 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut, strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Fungsi :

Sub Fungsi :

Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	**39.110.989.000**	**20.927.302.978**	**18.183.686.022**	**53,51**
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**	**19.287.148.000**	**10.807.631.629**	**8.479.516.371**	**56,04**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**687.578.000**	**275.406.730**	**412.171.270**	**40,05**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	407.873.000	142.142.780	265.730.220,00	34,85
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	254.523.000	122.726.950	131.796.050,00	48,22
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	12.591.000	6.991.000	5.600.000,00	55,52
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12.591.000	3.546.000	9.045.000,00	28,16
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**13.834.827.000**	**7.805.059.742**	**6.029.767.258**	**56,42**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	13.368.944.000	7.544.830.442	5.824.113.558,00	56,44
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	386.000.000	205.950.000	180.050.000,00	53,35
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.968.000	31.586.700	13.381.300,00	70,24
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.521.000	4.497.600	23.400,00	99,48
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunanan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	26.200.000	14.043.000	12.157.000,00	53,60
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.194.000	4.152.000	42.000,00	99,00
	Kegiatan Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**167.520.000**	**7.418.000**	**160.102.000**	**4**
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.174.000	2.409.000	1.765.000,00	57,71
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	-	155.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.173.000	3.060.000	1.113.000,00	73,33
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4.173.000	1.949.000	2.224.000,00	46,71
	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**59.178.000**	**30.585.900**	**28.592.100**	**51,6845787**
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.793.000	4.945.000	3.848.000,00	56,24
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13.080.000	10.650.000	2.430.000,00	81,42
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	-	10.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11.641.000	-	11.641.000,00	-
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.664.000	14.990.900	673.100,00	95,70
	Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	**1.018.803.000**	**520.620.280**	**498.182.720**	**51,10**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	33.000.000	33.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000	28.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.000.000	13.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	53.080.000	46.920.000,00	53,08
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.018.000	10.018.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.738.000	12.512.000	63.226.000,00	16,52
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550.969.000	240.486.880	310.482.120,00	43,65
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	17.210.000	17.210.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	190.868.000	113.313.400	77.554.600,00	59,37
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**89.830.000**	**89.830.000**	**-**	**100**
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.830.000	89.830.000	-	100,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2.830.515.000**	**1.680.456.407**	**1.150.058.593**	**59,37**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000	237.213.984	262.786.016,00	47,44
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.325.515.000	1.438.242.423	887.272.577,00	61,85
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**598.897.000**	**398.254.570**	**200.642.430**	**66**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.395.000	39.449.698	49.945.302,00	44,13
	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	131.779.372	68.220.628,00	65,89
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	13.000.000	12.980.000	20.000,00	99,85
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	36.975.000	23.025.000,00	61,63
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	156.545.500	43.454.500,00	78,27
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.502.000	20.525.000	15.977.000,00	56,23

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
II.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**12.634.852.000**	**7.648.033.030**	**4.986.818.970**	**60,53**
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**148.772.000**	**93.467.095**	**55.304.905**	**62,83**
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	104.754.000	63.453.600	41.300.400,00	60,57
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	44.018.000	30.013.495	14.004.505,00	68,18
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**100.908.000**	**43.975.850**	**56.932.150**	**43,58**
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarekawan Tanggap Bencana	100.908.000	43.975.850	56.932.150,00	43,58
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**10.884.280.000**	**6.704.556.322**	**4.179.723.678**	**61,60**
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.622.963.000	1.343.919.815	279.043.185,00	82,81
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	3.984.304.000	472.562.736	3.511.741.264,00	11,86
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang terdampak Relokasi Program Provinsi	5.277.013.000	4.888.073.771	388.939.229,00	92,63
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**1.500.892.000**	**806.033.763**	**694.858.237**	**53,70**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Provinsi	1.500.892.000	806.033.763	694.858.237,00	53,70
III.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.968.241.000**	**510.249.802**	**1.457.991.198**	**25,92**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**141.352.000**	**83.126.932**	**58.225.068**	**58,81**
	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	141.352.000	83.126.932	58.225.068,00	58,81
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**1.826.889.000**	**427.122.870**	**1.399.766.130**	**23,38**
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	12.777.000	9.844.500	2.932.500,00	77,05
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	162.832.000	132.889.060	29.942.940,00	81,61
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	1.651.280.000	284.389.310	1.366.890.690,00	17,22
IV.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**2.652.532.000**	**343.995.716**	**2.308.536.284**	**12,97**
	Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Permukiman	**2.652.532.000**	**343.995.716**	**2.308.536.284**	**12,97**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	21.692.000	12.626.000	9.066.000,00	58,21
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	2.630.840.000	331.369.716	2.299.470.284,00	12,60
V.	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**237.960.000**	**127.901.500**	**110.058.500**	**53,75**
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	**237.960.000**	**127.901.500**	**110.058.500**	**53,75**
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	237.960.000	127.901.500	110.058.500,00	53,75
VI.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**458.084.000**	**273.126.000**	**184.958.000**	**59,62**
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**458.084.000**	**273.126.000**	**184.958.000**	**59,62**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	346.105.000	209.623.000	136.482.000,00	60,57
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	111.979.000	63.503.000	48.476.000,00	56,71
VII.	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**392.099.000**	**197.002.500**	**195.096.500**	**50,24**
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupataen/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**392.099.000**	**197.002.500**	**195.096.500**	**50,24**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	334.671.000	160.821.500	173.849.500,00	48,05
	Sub Kegiatan Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	57.428.000	36.181.000	21.247.000,00	63,00

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
VIII.	**PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**323.099.000**	**185.795.659**	**137.303.341**	**57,50**
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Ulitilas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	**323.099.000**	**185.795.659**	**137.303.341**	57,50
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkonisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kialifikasi Menengah	323.099.000	185.795.659	137.303.341,00	57,50
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**1.156.974.000**	**833.567.142**	**323.406.858**	**72,05**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**1.156.974.000**	**833.567.142**	**323.406.858**	72,05
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	713.191.000	579.936.442	133.254.558,00	81,32
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	443.783.000	253.630.700	190.152.300,00	57,15
JUMLAH		**39.110.989.000**	**20.927.302.978**	**18.183.686.022**	**53,51**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144
Telepon (024) 76008247 Faksimile (024) 7608202
Laman https://www.disperakim.jatengprov.go.id , Pos-el disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Yth.	:	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Dari	:	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tembusan	:	-
Tanggal	:	01 Juli 2026
Nomor	:	067/KEU/VII/2026
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	-
Hal	:	Permohonan Asmanan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2026 Bulan Juni

Berikut kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Bulan Juni.

Bersama ini mohon dengan hormat asmanan Bapak untuk Laporan tersebut (terlampir).

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Muslichah Setiasih, S.IP, MMG, M.Eng
Pembina
NIP. 19800901 201001 2 018

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

BULAN JUNI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Bulan Juni pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Juni 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Boedyo Dharmawan, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 199803 1 003

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2026 bulan Juni sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, Juni 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Boedyo Dharmawan, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 199803 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntanbilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sistematis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntanbilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen

   Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan

   Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.31/508 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2026 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja Murni sebesar Rp. 39.810.871.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 39.495.871.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 315.000.000,- dan menjadi Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp. 39.110.989.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 38.796.129.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 314.860.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 19 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Tujuan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah **"Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Lestari"** dengan 4 (empat) sasaran yaitu :

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis
2. Perekonomian Tangguh yang Berdaya saing dan Berkelanjutan
3. SDM Berdaya Saing, Berkarakter dan Adaptif
4. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Gubernur pada periode perencanaan jangka menengah transisi 2024-2026 serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Kawasan Permukiman;
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
4. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;

5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
6. Program Redistrubusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2026
periode 1 Januari s.d 30 Juni 2026

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	**BELANJA DAERAH**	**39.110.989.000**	**17.558.062.402**	**44,89**	**21.552.926.598**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**38.796.129.000**	**17.493.202.402**	**45,09**	**21.302.926.598**
5.1.1	Belanja Pegawai	13.368.944.000	6.671.176.619	49,90	6.697.767.381
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.039.412.000	3.226.320.188	53,42	2.813.091.812
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.455.700.000	2.397.219.469	53,80	2.058.480.531
5.1.1.1.1.1	**Belanja Gaji Pokok PNS**	**3.638.000.000**	**1.941.683.800**	**53,37**	**1.696.316.200**
5.1.1.1.1.2	**Belanja Gaji Pokok PPPK**	**817.700.000**	**455.535.669**	**55,71**	**362.164.331**
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	381.000.000	208.595.391	54,75	172.404.609
5.1.1.1.2.1	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**	**343.500.000**	**187.789.486**	**54,67**	**155.710.514**
5.1.1.1.2.2	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**	**37.500.000**	**20.805.905**	**55,48**	**16.694.095**
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	176.540.000	97.100.000	55	79.440.000
5.1.1.1.3.1	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**	**176.540.000**	**97.100.000**	**55**	**79.440.000**
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	135.500.000	70.875.000	52,31	64.625.000
5.1.1.1.4.1	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**	**100.000.000**	**50.795.000**	**50,80**	**49.205.000**
5.1.1.1.4.2	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**	**35.500.000**	**20.080.000**	**56,56**	**15.420.000**
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	85.500.000	46.350.000	54,21	39.150.000
5.1.1.1.5.1	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**	**85.500.000**	**46.350.000**	**54,21**	**39.150.000**
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	220.000.000	119.758.540	54,44	100.241.460
5.1.1.1.6.1	**Belanja Tunjangan Beras PNS**	**185.000.000**	**101.967.360**	**55,12**	**83.032.640**
5.1.1.1.6.2	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**	**35.000.000**	**17.791.180**	**50,83**	**17.208.820**
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	96.800.000	89.359.941	92,31	7.440.059
5.1.1.1.7.1	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**	**96.800.000**	**89.359.941**	**92,31**	**7.440.059**
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	400.000	33.453	8,36	366.547
5.1.1.1.8.1	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**	**300.000**	**27.261**	**9,09**	**272.739**
5.1.1.1.8.2	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**	**100.000**	**6.192**	**6,19**	**93.808**
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	380.000.000	179.684.881	47,29	200.315.119
5.1.1.1.9.1	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**	**335.000.000**	**160.315.075**	**47,86**	**174.684.925**
5.1.1.1.9.2	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**	**45.000.000**	**19.369.806**	**43,04**	**25.630.194**
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.500.000	4.335.854	45,64	5.164.146
5.1.1.1.10.1	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**	**7.500.000**	**3.506.770**	**46,76**	**3.993.230**
5.1.1.1.10.2	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**	**2.000.000**	**829.084**	**41,45**	**1.170.916**
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.000.000	13.007.659	48,18	13.992.341
5.1.1.1.11.1	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**	**22.000.000**	**10.520.503**	**47,82**	**11.479.497**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.1.11.2	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**	**5.000.000**	**2.487.156**	**49,74**	**2.512.844**
5.1.1.1.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	71.472.000	0	0	71.472.000
5.1.1.1.12.1	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**	**56.684.000**	**0**	**0**	**56.684.000**
5.1.1.1.12.2	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK**	**14.788.000**	**0**	**0**	**14.788.000**
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.329.532.000	3.444.856.431	47	3.884.675.569
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.329.532.000	3.444.856.431	47	3.884.675.569
5.1.1.2.1.1	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**	**6.989.532.000**	**3.323.356.431**	**47,55**	**3.666.175.569**
5.1.1.2.1.2	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**	**340.000.000**	**121.500.000**	**35,74**	**218.500.000**
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.427.185.000	5.470.025.783	35,46	9.957.159.217
5.1.2.1	Belanja Barang	6.412.079.000	1.488.925.785	23,22	4.923.153.215
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	6.310.407.000	1.421.165.785	22,52	4.889.241.215
5.1.2.1.1.4	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**	**100.000.000**	**46.580.000**	**46,58**	**53.420.000**
5.1.2.1.1.9	**Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran**	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**
5.1.2.1.1.12	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**	**52.730.000**	**0**	**0**	**52.730.000**
5.1.2.1.1.24	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**	**241.682.500**	**176.996.405**	**73,24**	**64.686.095**
5.1.2.1.1.26	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**	**327.295.500**	**173.082.400**	**52,88**	**154.213.100**
5.1.2.1.1.27	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**	**11.800.000**	**11.800.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.1.31	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**	**33.000.000**	**33.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.1.35	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**	**13.842.000**	**2.400.000**	**17,34**	**11.442.000**
5.1.2.1.1.36	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.1.39	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**	**208.000.000**	**183.210.000**	**88,08**	**24.790.000**
5.1.2.1.1.40	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**	**3.487.698.000**	**34.920.000**	**1**	**3.452.778.000**
5.1.2.1.1.52	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**	**1.787.121.000**	**740.879.980**	**41,46**	**1.046.241.020**
5.1.2.1.1.53	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**	**32.738.000**	**8.297.000**	**25,34**	**24.441.000**
5.1.2.1.1.64	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**	**1.500.000**	**0**	**0**	**1.500.000**
5.1.2.1.4	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	101.672.000	67.760.000	66,65	33.912.000
5.1.2.1.4.117	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**	**16.702.000**	**10.315.000**	**61,76**	**6.387.000**
5.1.2.1.4.137	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-**	**24.970.000**	**24.970.000**	**100**	**0**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Alat Studio Lainnya				
5.1.2.1.4.411	**Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**	**60.000.000**	**32.475.000**	**54,13**	**27.525.000**
5.1.2.2	Belanja Jasa	6.374.260.000	2.596.113.434	40,73	3.778.146.566
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	5.192.588.000	2.395.231.408	46,13	2.797.356.592
5.1.2.2.1.3	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**	**608.110.000**	**214.100.000**	**35,21**	**394.010.000**
5.1.2.2.1.4	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**	**17.100.000**	**8.550.000**	**50**	**8.550.000**
5.1.2.2.1.6	**Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**	**2.500.000**	**0**	**0**	**2.500.000**
5.1.2.2.1.25	**Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan**	**7.200.000**	**300.000**	**4,17**	**6.900.000**
5.1.2.2.1.29	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**	**1.172.313.000**	**519.278.325**	**44,30**	**653.034.675**
5.1.2.2.1.30	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**	**552.500.000**	**293.481.360**	**53,12**	**259.018.640**
5.1.2.2.1.31	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**	**709.800.000**	**383.770.740**	**54,07**	**326.029.260**
5.1.2.2.1.33	**Belanja Jasa Tenaga Supir**	**50.700.000**	**27.212.064**	**53,67**	**23.487.936**
5.1.2.2.1.34	**Belanja Jasa Tenaga Juru Masak**	**101.400.000**	**54.436.800**	**53,69**	**46.963.200**
5.1.2.2.1.46	**Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi**	**150.000.000**	**0**	**0**	**150.000.000**
5.1.2.2.1.59	**Belanja Tagihan Telepon**	**52.500.000**	**25.296.420**	**48,18**	**27.203.580**
5.1.2.2.1.60	**Belanja Tagihan Air**	**24.000.000**	**11.696.002**	**48,73**	**12.303.998**
5.1.2.2.1.61	**Belanja Tagihan Listrik**	**423.500.000**	**165.176.745**	**39**	**258.323.255**
5.1.2.2.1.67	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**	**31.050.000**	**20.070.500**	**64,64**	**10.979.500**
5.1.2.2.1.80	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**	**378.000.000**	**173.100.000**	**45,79**	**204.900.000**
5.1.2.2.1.81	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**	**8.000.000**	**4.000.000**	**50**	**4.000.000**
5.1.2.2.1.90	**Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional**	**903.915.000**	**494.762.452**	**54,74**	**409.152.548**
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	155.000.000	0	0	155.000.000
5.1.2.2.2.8	**Belanja Asuransi Barang Milik Daerah**	**155.000.000**	**0**	**0**	**155.000.000**
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.000.000	0	0	30.000.000
5.1.2.2.4.36	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**	**30.000.000**	**0**	**0**	**30.000.000**
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	44.000.000	0	0	44.000.000
5.1.2.2.5.25	**Belanja Sewa Bangunan Terbuka**	**44.000.000**	**0**	**0**	**44.000.000**
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	455.672.000	200.882.026	44,08	254.789.974
5.1.2.2.8.9	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi**	**258.698.000**	**200.882.026**	**77,65**	**57.815.974**
5.1.2.2.8.20	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi**	**196.974.000**	**0**	**0**	**196.974.000**
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	490.000.000	0	0	490.000.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.9.14	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**	**490.000.000**	**0**	**0**	**490.000.000**
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.000.000	0	0	7.000.000
5.1.2.2.12.1	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**	**7.000.000**	**0**	**0**	**7.000.000**
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	491.145.000	258.583.438	52,65	232.561.562
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	291.145.000	139.517.438	47,92	151.627.562
5.1.2.3.2.22	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set**	**14.500.000**	**7.560.000**	**52,14**	**6.940.000**
5.1.2.3.2.23	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa**	**5.300.000**	**0**	**0**	**5.300.000**
5.1.2.3.2.36	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**	**258.345.000**	**124.197.438**	**48,07**	**134.147.562**
5.1.2.3.2.118	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel**	**13.000.000**	**7.760.000**	**59,69**	**5.240.000**
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000	119.066.000	59,53	80.934.000
5.1.2.3.3.1	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**	**200.000.000**	**119.066.000**	**59,53**	**80.934.000**
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	2.149.701.000	1.126.403.126	52,40	1.023.297.874
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.149.701.000	1.126.403.126	52,40	1.023.297.874
5.1.2.4.1.1	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**	**2.149.701.000**	**1.126.403.126**	**52,40**	**1.023.297.874**
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000	5.352.000.000	53,52	4.648.000.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	10.000.000.000	5.352.000.000	53,52	4.648.000.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	10.000.000.000	5.352.000.000	53,52	4.648.000.000
5.1.6.1.2.1	**Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**	**10.000.000.000**	**5.352.000.000**	**53,52**	**4.648.000.000**
5.2	**BELANJA MODAL**	**314.860.000**	**64.860.000**	**20,60**	**250.000.000**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.860.000	64.860.000	100	0
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	49.920.000	49.920.000	100	0
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	49.920.000	49.920.000	100	0
5.2.2.5.2.4	**Belanja Modal Alat Pendingin**	**49.920.000**	**49.920.000**	**100**	**0**
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	14.940.000	14.940.000	100	0
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.940.000	14.940.000	100	0
5.2.2.10.2.4	**Belanja Modal Peralatan Jaringan**	**14.940.000**	**14.940.000**	**100**	**0**
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000	0	0	250.000.000
5.2.6.1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	250.000.000	0	0	250.000.000
5.2.6.1.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	250.000.000	0	0	250.000.000
5.2.6.1.1.5	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software**	**250.000.000**	**0**	**0**	**250.000.000**
	Jumlah Belanja	**39.110.989.000**	**17.558.062.402**	**44,89**	**21.552.926.598**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Surplus/(Defisit)	**0**	**(17.558.062.402)**	**100**	**17.558.062.402**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**	**(17.558.062.402)**	**100**	**17.558.062.402**

Semarang, 30 Juni 2026

PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(MUSLICHAH SETIASIH, M.Eng., MMG, S.IP)

NIP. 19800901 201001 2 018

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 39.810.871.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 39.495.871.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 315.000.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Anggaran Belanja Perubahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 39.110.989.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 38.796.129.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 314.860.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 13.368.944.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.671.176.619,- dengan Presentasi 49.90 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 15.427.185.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.470.025.783,- dengan Presentasi 35.46 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.352.000.000,- dengan Presentasi 53.52 %.

Belanja Modal *:*

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 314.860.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 64.860.000,- dengan Presentasi 20.60 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 64.860.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 64.860.000,- dengan Presentasi 100 %; dan Belanja Modal Aset Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0%.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut, strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Fungsi :

Sub Fungsi :

Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	**39.110.989.000**	**17.558.062.402**	**21.552.926.598**	**44,89**
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**	**19.287.148.000**	**9.376.215.250**	**9.910.932.750**	**48,61**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**687.578.000**	**222.466.230**	**465.111.770**	**32,36**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	407.873.000	115.578.280	292.294.720,00	28,34
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	254.523.000	98.735.950	155.787.050,00	38,79
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	12.591.000	5.666.000	6.925.000,00	45,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12.591.000	2.486.000	10.105.000,00	19,74
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**13.834.827.000**	**6.891.854.219**	**6.942.972.781**	**49,82**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	13.368.944.000	6.671.176.619	6.697.767.381,00	49,90
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	386.000.000	177.100.000	208.900.000,00	45,88
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.968.000	20.885.000	24.083.000,00	46,44
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.521.000	4.497.600	23.400,00	99,48
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunanan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	26.200.000	14.043.000	12.157.000,00	53,60
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.194.000	4.152.000	42.000,00	99,00
	Kegiatan Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**167.520.000**	**6.058.000**	**161.462.000**	**4**
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.174.000	2.409.000	1.765.000,00	57,71
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	-	155.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.173.000	1.700.000	2.473.000,00	40,74
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4.173.000	1.949.000	2.224.000,00	46,71
	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**59.178.000**	**22.585.900**	**36.592.100**	**38,1660414**
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.793.000	4.945.000	3.848.000,00	56,24
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13.080.000	2.650.000	10.430.000,00	20,26
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	-	10.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11.641.000	-	11.641.000,00	-
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.664.000	14.990.900	673.100,00	95,70
	Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	**1.018.803.000**	**360.844.380**	**657.958.620**	**35,42**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	33.000.000	33.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000	28.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.000.000	10.000.000	3.000.000,00	76,92
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	46.580.000	53.420.000,00	46,58
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.018.000	10.018.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.738.000	10.697.000	65.041.000,00	14,12
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550.969.000	185.983.380	364.985.620,00	33,76
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	17.210.000	16.415.000	795.000,00	95,38
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	190.868.000	20.151.000	170.717.000,00	10,56
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**89.830.000**	**89.830.000**	**-**	**100**
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.830.000	89.830.000	-	100,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2.830.515.000**	**1.461.132.583**	**1.369.382.417**	**51,62**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000	202.169.167	297.830.833,00	40,43
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.325.515.000	1.253.963.416	1.071.551.584,00	53,92
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**598.897.000**	**321.443.938**	**277.453.062**	**54**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.395.000	30.301.816	59.093.184,00	33,90
	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	113.966.122	86.033.878,00	56,98
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	13.000.000	7.760.000	5.240.000,00	59,69
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	32.475.000	27.525.000,00	54,13
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	119.066.000	80.934.000,00	59,53
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.502.000	17.875.000	18.627.000,00	48,97

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
II.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**12.634.852.000**	**6.563.812.485**	**6.071.039.515**	**51,95**
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**148.772.000**	**83.732.475**	**65.039.525**	**56,28**
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	104.754.000	57.538.980	47.215.020,00	54,93
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	44.018.000	26.193.495	17.824.505,00	59,51
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**100.908.000**	**35.938.850**	**64.969.150**	**35,62**
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarekawan Tanggap Bencana	100.908.000	35.938.850	64.969.150,00	35,62
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**10.884.280.000**	**5.799.224.812**	**5.085.055.188**	**53,28**
	Sub Kegiatan Rehabiltasi Rumah bagi Korban Bencana	1.622.963.000	988.157.655	634.805.345,00	60,89
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	3.984.304.000	455.318.036	3.528.985.964,00	11,43
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang terdampak Relokasi Program Provinsi	5.277.013.000	4.355.749.121	921.263.879,00	82,54
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**1.500.892.000**	**644.916.348**	**855.975.652**	**42,97**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Provinsi	1.500.892.000	644.916.348	855.975.652,00	42,97
III.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.968.241.000**	**377.935.310**	**1.590.305.690**	**19,20**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**141.352.000**	**58.271.500**	**83.080.500**	**41,22**
	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	141.352.000	58.271.500	83.080.500,00	41,22
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**1.826.889.000**	**319.663.810**	**1.507.225.190**	**17,50**
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	12.777.000	6.599.500	6.177.500,00	51,65
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	162.832.000	39.155.000	123.677.000,00	24,05
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	1.651.280.000	273.909.310	1.377.370.690,00	16,59
IV.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**2.652.532.000**	**328.647.716**	**2.323.884.284**	**12,39**
	Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Permukiman	**2.652.532.000**	**328.647.716**	**2.323.884.284**	**12,39**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	21.692.000	5.518.000	16.174.000,00	25,44
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	2.630.840.000	323.129.716	2.307.710.284,00	12,28
V.	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**237.960.000**	**101.110.000**	**136.850.000**	**42,49**
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	**237.960.000**	**101.110.000**	**136.850.000**	**42,49**
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	237.960.000	101.110.000	136.850.000,00	42,49
VI.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**458.084.000**	**207.476.000**	**250.608.000**	**45,29**
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**458.084.000**	**207.476.000**	**250.608.000**	**45,29**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	346.105.000	161.603.000	184.502.000,00	46,69
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	111.979.000	45.873.000	66.106.000,00	40,97
VII.	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**392.099.000**	**173.057.500**	**219.041.500**	**44,14**
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupataen/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**392.099.000**	**173.057.500**	**219.041.500**	**44,14**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	334.671.000	137.039.500	197.631.500,00	40,95
	Sub Kegiatan Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	57.428.000	36.018.000	21.410.000,00	62,72

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
VIII.	**PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**323.099.000**	**155.176.759**	**167.922.241**	**48,03**
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Ulitilas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	**323.099.000**	**155.176.759**	**167.922.241**	**48,03**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkonisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kialifikasi Menengah	323.099.000	155.176.759	167.922.241,00	48,03
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**1.156.974.000**	**274.631.382**	**882.342.618**	**23,74**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**1.156.974.000**	**274.631.382**	**882.342.618**	**23,74**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	713.191.000	76.878.182	636.312.818,00	10,78
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	443.783.000	197.753.200	246.029.800,00	44,56
	JUMLAH	**39.110.989.000**	**17.558.062.402**	**21.552.926.598**	**44,89**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144
Telepon (024) 76008247 Faksimile (024) 7608202
Laman https://www.disperakim.jatengprov.go.id , Pos-el disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Yth.	:	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Dari	:	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tembusan	:	-
Tanggal	:	02 Juni 2026
Nomor	:	056/KEU/VI/2026
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	-
Hal	:	Permohonan Asmanan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2026 Bulan Mei

Berikut kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Bulan Mei.

Bersama ini mohon dengan hormat asmanan Bapak untuk Laporan tersebut (terlampir).

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Muslichah Setiasih, S.IP, MMG, M.Eng
Pembina
NIP. 19800901 201001 2 018



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

BULAN MEI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Bulan Mei pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Mei 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Boedyo Dharmawan, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 199803 1 003

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2026 bulan Mei sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, Mei 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Boedyo Dharmawan, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 199803 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntanbilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sistematis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntanbilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen

   Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan

   Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.31/508 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2026 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja Murni sebesar Rp. 39.810.871.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 39.495.871.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 315.000.000,- dan menjadi Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp. 39.110.989.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 38.796.129.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 314.860.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 19 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Tujuan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah **"Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Lestari"** dengan 4 (empat) sasaran yaitu :

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis
2. Perekonomian Tangguh yang Berdaya saing dan Berkelanjutan
3. SDM Berdaya Saing, Berkarakter dan Adaptif
4. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Gubernur pada periode perencanaan jangka menengah transisi 2024-2026 serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Kawasan Permukiman;
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
4. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;

5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
6. Program Redistrubusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2026
periode 1 Januari s.d 31 Mei 2026

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	**BELANJA DAERAH**	**39.110.989.000**	**12.577.074.688**	**32,16**	**26.533.914.312**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**38.796.129.000**	**12.512.214.688**	**32,25**	**26.283.914.312**
5.1.1	Belanja Pegawai	13.368.944.000	5.374.910.500	40,20	7.994.033.500
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.039.412.000	2.420.145.351	40,07	3.619.266.649
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.455.700.000	1.803.628.069	40,48	2.652.071.931
5.1.1.1.1.1	**Belanja Gaji Pokok PNS**	**3.638.000.000**	**1.463.835.600**	**40,24**	**2.174.164.400**
5.1.1.1.1.2	**Belanja Gaji Pokok PPPK**	**817.700.000**	**339.792.469**	**41,55**	**477.907.531**
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	381.000.000	156.043.771	40,96	224.956.229
5.1.1.1.2.1	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**	**343.500.000**	**140.519.578**	**40,91**	**202.980.422**
5.1.1.1.2.2	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**	**37.500.000**	**15.524.193**	**41,40**	**21.975.807**
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	176.540.000	72.960.000	41,33	103.580.000
5.1.1.1.3.1	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**	**176.540.000**	**72.960.000**	**41,33**	**103.580.000**
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	135.500.000	53.225.000	39,28	82.275.000
5.1.1.1.4.1	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**	**100.000.000**	**38.165.000**	**38,17**	**61.835.000**
5.1.1.1.4.2	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**	**35.500.000**	**15.060.000**	**42,42**	**20.440.000**
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	85.500.000	35.065.000	41,01	50.435.000
5.1.1.1.5.1	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**	**85.500.000**	**35.065.000**	**41,01**	**50.435.000**
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	220.000.000	89.776.660	40,81	130.223.340
5.1.1.1.6.1	**Belanja Tunjangan Beras PNS**	**185.000.000**	**76.475.520**	**41,34**	**108.524.480**
5.1.1.1.6.2	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**	**35.000.000**	**13.301.140**	**38**	**21.698.860**
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	96.800.000	45.353.257	46,85	51.446.743
5.1.1.1.7.1	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**	**96.800.000**	**45.353.257**	**46,85**	**51.446.743**
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	400.000	25.053	6,26	374.947
5.1.1.1.8.1	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**	**300.000**	**20.632**	**6,88**	**279.368**
5.1.1.1.8.2	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**	**100.000**	**4.421**	**4,42**	**95.579**
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	380.000.000	149.594.664	39,37	230.405.336
5.1.1.1.9.1	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**	**335.000.000**	**133.825.757**	**39,95**	**201.174.243**
5.1.1.1.9.2	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**	**45.000.000**	**15.768.907**	**35,04**	**29.231.093**
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.500.000	3.618.450	38,09	5.881.550
5.1.1.1.10.1	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**	**7.500.000**	**2.928.264**	**39,04**	**4.571.736**
5.1.1.1.10.2	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**	**2.000.000**	**690.186**	**34,51**	**1.309.814**
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.000.000	10.855.427	40,21	16.144.573
5.1.1.1.11.1	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**	**22.000.000**	**8.784.949**	**39,93**	**13.215.051**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.1.11.2	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**	**5.000.000**	**2.070.478**	**41,41**	**2.929.522**
5.1.1.1.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	71.472.000	0	0	71.472.000
5.1.1.1.12.1	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**	**56.684.000**	**0**	**0**	**56.684.000**
5.1.1.1.12.2	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK**	**14.788.000**	**0**	**0**	**14.788.000**
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.329.532.000	2.954.765.149	40,31	4.374.766.851
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.329.532.000	2.954.765.149	40,31	4.374.766.851
5.1.1.2.1.1	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**	**6.989.532.000**	**2.860.265.149**	**40,92**	**4.129.266.851**
5.1.1.2.1.2	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**	**340.000.000**	**94.500.000**	**27,79**	**245.500.000**
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.427.185.000	4.425.304.188	28,69	11.001.880.812
5.1.2.1	Belanja Barang	6.412.079.000	1.145.539.005	17,87	5.266.539.995
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	6.310.407.000	1.081.339.005	17,14	5.229.067.995
5.1.2.1.1.4	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**	**100.000.000**	**40.080.000**	**40,08**	**59.920.000**
5.1.2.1.1.9	**Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran**	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**
5.1.2.1.1.12	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**	**52.730.000**	**0**	**0**	**52.730.000**
5.1.2.1.1.24	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**	**241.682.500**	**162.478.605**	**67,23**	**79.203.895**
5.1.2.1.1.26	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**	**327.295.500**	**158.818.400**	**48,52**	**168.477.100**
5.1.2.1.1.27	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**	**11.800.000**	**9.800.000**	**83,05**	**2.000.000**
5.1.2.1.1.31	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**	**33.000.000**	**33.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.1.35	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**	**13.842.000**	**2.400.000**	**17,34**	**11.442.000**
5.1.2.1.1.36	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.1.39	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**	**208.000.000**	**0**	**0**	**208.000.000**
5.1.2.1.1.40	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**	**3.487.698.000**	**15.000.000**	**0,43**	**3.472.698.000**
5.1.2.1.1.52	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**	**1.787.121.000**	**643.425.000**	**36**	**1.143.696.000**
5.1.2.1.1.53	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**	**32.738.000**	**6.337.000**	**19,36**	**26.401.000**
5.1.2.1.1.64	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**	**1.500.000**	**0**	**0**	**1.500.000**
5.1.2.1.4	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	101.672.000	64.200.000	63,14	37.472.000
5.1.2.1.4.117	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**	**16.702.000**	**10.315.000**	**61,76**	**6.387.000**
5.1.2.1.4.137	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-**	**24.970.000**	**24.970.000**	**100**	**0**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Alat Studio Lainnya				
5.1.2.1.4.411	**Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**	**60.000.000**	**28.915.000**	**48,19**	**31.085.000**
5.1.2.2	Belanja Jasa	6.374.260.000	2.157.158.015	33,84	4.217.101.985
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	5.192.588.000	1.985.600.679	38,24	3.206.987.321
5.1.2.2.1.3	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**	**608.110.000**	**168.200.000**	**27,66**	**439.910.000**
5.1.2.2.1.4	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**	**17.100.000**	**0**	**0**	**17.100.000**
5.1.2.2.1.6	**Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**	**2.500.000**	**0**	**0**	**2.500.000**
5.1.2.2.1.25	**Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan**	**7.200.000**	**300.000**	**4,17**	**6.900.000**
5.1.2.2.1.29	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**	**1.172.313.000**	**451.031.175**	**38,47**	**721.281.825**
5.1.2.2.1.30	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**	**552.500.000**	**250.327.800**	**45,31**	**302.172.200**
5.1.2.2.1.31	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**	**709.800.000**	**329.486.540**	**46,42**	**380.313.460**
5.1.2.2.1.33	**Belanja Jasa Tenaga Supir**	**50.700.000**	**23.302.115**	**45,96**	**27.397.885**
5.1.2.2.1.34	**Belanja Jasa Tenaga Juru Masak**	**101.400.000**	**46.614.790**	**45,97**	**54.785.210**
5.1.2.2.1.46	**Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi**	**150.000.000**	**0**	**0**	**150.000.000**
5.1.2.2.1.59	**Belanja Tagihan Telepon**	**52.500.000**	**21.052.169**	**40,10**	**31.447.831**
5.1.2.2.1.60	**Belanja Tagihan Air**	**24.000.000**	**9.975.560**	**41,56**	**14.024.440**
5.1.2.2.1.61	**Belanja Tagihan Listrik**	**423.500.000**	**137.160.872**	**32,39**	**286.339.128**
5.1.2.2.1.67	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**	**31.050.000**	**12.269.000**	**39,51**	**18.781.000**
5.1.2.2.1.80	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**	**378.000.000**	**144.250.000**	**38,16**	**233.750.000**
5.1.2.2.1.81	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**	**8.000.000**	**2.000.000**	**25**	**6.000.000**
5.1.2.2.1.90	**Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional**	**903.915.000**	**389.630.658**	**43,10**	**514.284.342**
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	155.000.000	0	0	155.000.000
5.1.2.2.2.8	**Belanja Asuransi Barang Milik Daerah**	**155.000.000**	**0**	**0**	**155.000.000**
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.000.000	0	0	30.000.000
5.1.2.2.4.36	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**	**30.000.000**	**0**	**0**	**30.000.000**
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	44.000.000	0	0	44.000.000
5.1.2.2.5.25	**Belanja Sewa Bangunan Terbuka**	**44.000.000**	**0**	**0**	**44.000.000**
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	455.672.000	171.557.336	37,65	284.114.664
5.1.2.2.8.9	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi**	**258.698.000**	**171.557.336**	**66,32**	**87.140.664**
5.1.2.2.8.20	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi**	**196.974.000**	**0**	**0**	**196.974.000**
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	490.000.000	0	0	490.000.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.9.14	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**	**490.000.000**	**0**	**0**	**490.000.000**
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.000.000	0	0	7.000.000
5.1.2.2.12.1	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**	**7.000.000**	**0**	**0**	**7.000.000**
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	491.145.000	188.198.624	38,32	302.946.376
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	291.145.000	92.338.624	31,72	198.806.376
5.1.2.3.2.22	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set**	**14.500.000**	**7.560.000**	**52,14**	**6.940.000**
5.1.2.3.2.23	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa**	**5.300.000**	**0**	**0**	**5.300.000**
5.1.2.3.2.36	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**	**258.345.000**	**77.018.624**	**29,81**	**181.326.376**
5.1.2.3.2.118	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel**	**13.000.000**	**7.760.000**	**59,69**	**5.240.000**
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000	95.860.000	47,93	104.140.000
5.1.2.3.3.1	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**	**200.000.000**	**95.860.000**	**47,93**	**104.140.000**
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	2.149.701.000	934.408.544	43,47	1.215.292.456
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.149.701.000	934.408.544	43,47	1.215.292.456
5.1.2.4.1.1	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**	**2.149.701.000**	**934.408.544**	**43,47**	**1.215.292.456**
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000	2.712.000.000	27,12	7.288.000.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	10.000.000.000	2.712.000.000	27,12	7.288.000.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	10.000.000.000	2.712.000.000	27,12	7.288.000.000
5.1.6.1.2.1	**Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**	**10.000.000.000**	**2.712.000.000**	**27,12**	**7.288.000.000**
5.2	**BELANJA MODAL**	**314.860.000**	**64.860.000**	**20,60**	**250.000.000**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.860.000	64.860.000	100	0
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	49.920.000	49.920.000	100	0
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	49.920.000	49.920.000	100	0
5.2.2.5.2.4	**Belanja Modal Alat Pendingin**	**49.920.000**	**49.920.000**	**100**	**0**
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	14.940.000	14.940.000	100	0
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.940.000	14.940.000	100	0
5.2.2.10.2.4	**Belanja Modal Peralatan Jaringan**	**14.940.000**	**14.940.000**	**100**	**0**
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000	0	0	250.000.000
5.2.6.1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	250.000.000	0	0	250.000.000
5.2.6.1.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	250.000.000	0	0	250.000.000
5.2.6.1.1.5	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software**	**250.000.000**	**0**	**0**	**250.000.000**
	Jumlah Belanja	**39.110.989.000**	**12.577.074.688**	**32,16**	**26.533.914.312**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Surplus/(Defisit)	**0**	**(12.577.074.688)**	**100**	**12.577.074.688**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**	**(12.577.074.688)**	**100**	**12.577.074.688**

Semarang, 31 Mei 2026

PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(MUSLICHAH SETIASIH, M.Eng., MMG, S.IP)

NIP. 19800901 201001 2 018

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 39.810.871.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 39.495.871.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 315.000.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Anggaran Belanja Perubahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 39.110.989.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 38.796.129.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 314.860.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 13.368.944.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.374.910.500,- dengan Presentasi 40.20 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 15.427.185.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.425.304.188,- dengan Presentasi 28.69 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.712.000.000,- dengan Presentasi 27.12 %.

Belanja Modal *:*

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 314.860.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 64.860.000,- dengan Presentasi 20.60 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 64.860.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 64.860.000,- dengan Presentasi 100 %; dan Belanja Modal Aset Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0%.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut, strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Fungsi :

Sub Fungsi :

Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	**39.110.989.000**	**12.577.074.688**	**26.533.914.312**	**32,16**
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**	**19.287.148.000**	**7.628.000.958**	**11.659.147.042**	**39,55**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**687.578.000**	**189.579.730**	**497.998.270**	**27,57**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	407.873.000	97.452.280	310.420.720,00	23,89
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	254.523.000	87.521.450	167.001.550,00	34,39
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	12.591.000	3.546.000	9.045.000,00	28,16
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12.591.000	1.060.000	11.531.000,00	8,42
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**13.834.827.000**	**5.555.576.100**	**8.279.250.900**	**40,16**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	13.368.944.000	5.374.910.500	7.994.033.500,00	40,20
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	386.000.000	146.250.000	239.750.000,00	37,89
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.968.000	13.260.000	31.708.000,00	29,49
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.521.000	4.497.600	23.400,00	99,48
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunanan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	26.200.000	14.043.000	12.157.000,00	53,60
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.194.000	2.615.000	1.579.000,00	62,35
	Kegiatan Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**167.520.000**	**6.058.000**	**161.462.000**	**4**
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.174.000	2.409.000	1.765.000,00	57,71
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	-	155.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.173.000	1.700.000	2.473.000,00	40,74
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4.173.000	1.949.000	2.224.000,00	46,71
	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**59.178.000**	**16.690.900**	**42.487.100**	**28,2045693**
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.793.000	1.700.000	7.093.000,00	19,33
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13.080.000	-	13.080.000,00	-
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	-	10.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11.641.000	-	11.641.000,00	-
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.664.000	14.990.900	673.100,00	95,70
	Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	**1.018.803.000**	**317.718.100**	**701.084.900**	**31,19**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	33.000.000	33.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000	28.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.000.000	10.000.000	3.000.000,00	76,92
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	40.080.000	59.920.000,00	40,08
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.018.000	9.535.000	483.000,00	95,18
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.738.000	8.737.000	67.001.000,00	11,54
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550.969.000	158.016.100	392.952.900,00	28,68
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	17.210.000	16.415.000	795.000,00	95,38
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	190.868.000	13.935.000	176.933.000,00	7,30
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**89.830.000**	**89.830.000**	**-**	**100**
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.830.000	89.830.000	-	100,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2.830.515.000**	**1.212.850.504**	**1.617.664.496**	**42,85**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000	168.188.601	331.811.399,00	33,64
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.325.515.000	1.039.661.903	1.285.853.097,00	44,71
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**598.897.000**	**239.697.624**	**359.199.376**	**40**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.395.000	13.236.624	76.158.376,00	14,81
	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	76.051.000	123.949.000,00	38,03
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	13.000.000	7.760.000	5.240.000,00	59,69
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	28.915.000	31.085.000,00	48,19
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	95.860.000	104.140.000,00	47,93
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.502.000	17.875.000	18.627.000,00	48,97

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
II.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**12.634.852.000**	**3.746.443.553**	**8.888.408.447**	**29,65**
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**148.772.000**	**76.096.475**	**72.675.525**	**51,15**
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	104.754.000	52.348.980	52.405.020,00	49,97
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	44.018.000	23.747.495	20.270.505,00	53,95
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**100.908.000**	**14.372.850**	**86.535.150**	**14,24**
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarekawan Tanggap Bencana	100.908.000	14.372.850	86.535.150,00	14,24
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**10.884.280.000**	**3.076.170.586**	**7.808.109.414**	**28,26**
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.622.963.000	635.199.255	987.763.745,00	39,14
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	3.984.304.000	74.799.085	3.909.504.915,00	1,88
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang terdampak Relokasi Program Provinsi	5.277.013.000	2.366.172.246	2.910.840.754,00	44,84
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**1.500.892.000**	**579.803.642**	**921.088.358**	**38,63**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Provinsi	1.500.892.000	579.803.642	921.088.358,00	38,63
III.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.968.241.000**	**326.337.620**	**1.641.903.380**	**16,58**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**141.352.000**	**49.595.000**	**91.757.000**	**35,09**
	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	141.352.000	49.595.000	91.757.000,00	35,09
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**1.826.889.000**	**276.742.620**	**1.550.146.380**	**15,15**
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	12.777.000	5.875.500	6.901.500,00	45,98
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	162.832.000	28.643.500	134.188.500,00	17,59
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	1.651.280.000	242.223.620	1.409.056.380,00	14,67
IV.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**2.652.532.000**	**142.574.716**	**2.509.957.284**	**5,38**
	Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Permukiman	**2.652.532.000**	**142.574.716**	**2.509.957.284**	**5,38**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	21.692.000	3.255.000	18.437.000,00	15,01
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	2.630.840.000	139.319.716	2.491.520.284,00	5,30
V.	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**237.960.000**	**86.242.500**	**151.717.500**	**36,24**
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	**237.960.000**	**86.242.500**	**151.717.500**	**36,24**
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	237.960.000	86.242.500	151.717.500,00	36,24
VI.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**458.084.000**	**136.547.000**	**321.537.000**	**29,81**
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**458.084.000**	**136.547.000**	**321.537.000**	**29,81**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	346.105.000	100.207.000	245.898.000,00	28,95
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	111.979.000	36.340.000	75.639.000,00	32,45
VII.	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**392.099.000**	**151.919.500**	**240.179.500**	**38,75**
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupataen/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**392.099.000**	**151.919.500**	**240.179.500**	**38,75**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	334.671.000	117.761.500	216.909.500,00	35,19
	Sub Kegiatan Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	57.428.000	34.158.000	23.270.000,00	59,48

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
VIII.	**PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**323.099.000**	**125.218.659**	**197.880.341**	**38,76**
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Ulitilas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	**323.099.000**	**125.218.659**	**197.880.341**	**38,76**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkonisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kialifikasi Menengah	323.099.000	125.218.659	197.880.341,00	38,76
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**1.156.974.000**	**233.790.182**	**923.183.818**	**20,21**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**1.156.974.000**	**233.790.182**	**923.183.818**	**20,21**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	713.191.000	56.631.982	656.559.018,00	7,94
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	443.783.000	177.158.200	266.624.800,00	39,92
	JUMLAH	**39.110.989.000**	**12.577.074.688**	**26.533.914.312**	**32,16**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144
Telepon (024) 76008247 Faksimile (024) 7608202
Laman https://www.disperakim.jatengprov.go.id , Pos-el disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Yth.	:	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Dari	:	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tembusan	:	-
Tanggal	:	04 Mei 2026
Nomor	:	045/KEU/V/2026
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	-
Hal	:	Permohonan Asmanan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2026 Bulan April

Berikut kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Bulan April.

Bersama ini mohon dengan hormat asmanan Bapak untuk Laporan tersebut (terlampir).

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Muslichah Setiasih, S.IP, MMG, M.Eng
Pembina
NIP. 19800901 201001 2 018

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

BULAN APRIL

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Bulan April pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, April 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Boedyo Dharmawan, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 199803 1 003

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2026 bulan April sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, April 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Boedyo Dharmawan, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 199803 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntanbilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sistematis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntanbilitas
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen
   Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan
   Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.31/508 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2026 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja Murni sebesar Rp. 39.810.871.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 39.495.871.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 315.000.000,- dan menjadi Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp. 39.110.989.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 38.796.129.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 314.860.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 19 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Tujuan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah **"Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Lestari"** dengan 4 (empat) sasaran yaitu :

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis
2. Perekonomian Tangguh yang Berdaya saing dan Berkelanjutan
3. SDM Berdaya Saing, Berkarakter dan Adaptif
4. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Gubernur pada periode perencanaan jangka menengah transisi 2024-2026 serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Kawasan Permukiman;
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
4. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;

5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
6. Program Redistrubusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2026
periode 30 April s.d 0 April 2026

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	**BELANJA DAERAH**	**39.110.989.000**	**10.091.243.417**	**25,80**	**29.019.745.583**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**38.796.129.000**	**10.026.383.417**	**25,84**	**28.769.745.583**
5.1.1	Belanja Pegawai	13.368.944.000	4.491.754.714	33,60	8.877.189.286
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.039.412.000	2.025.139.739	33,53	4.014.272.261
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.455.700.000	1.508.957.069	33,87	2.946.742.931
5.1.1.1.1.1	**Belanja Gaji Pokok PNS**	**3.638.000.000**	**1.227.036.200**	**33,73**	**2.410.963.800**
5.1.1.1.1.2	**Belanja Gaji Pokok PPPK**	**817.700.000**	**281.920.869**	**34,48**	**535.779.131**
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	381.000.000	130.049.265	34,13	250.950.735
5.1.1.1.2.1	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**	**343.500.000**	**117.165.928**	**34,11**	**226.334.072**
5.1.1.1.2.2	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**	**37.500.000**	**12.883.337**	**34,36**	**24.616.663**
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	176.540.000	60.890.000	34,49	115.650.000
5.1.1.1.3.1	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**	**176.540.000**	**60.890.000**	**34,49**	**115.650.000**
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	135.500.000	44.400.000	32,77	91.100.000
5.1.1.1.4.1	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**	**100.000.000**	**31.850.000**	**31,85**	**68.150.000**
5.1.1.1.4.2	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**	**35.500.000**	**12.550.000**	**35,35**	**22.950.000**
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	85.500.000	29.515.000	34,52	55.985.000
5.1.1.1.5.1	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**	**85.500.000**	**29.515.000**	**34,52**	**55.985.000**
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	220.000.000	74.930.560	34,06	145.069.440
5.1.1.1.6.1	**Belanja Tunjangan Beras PNS**	**185.000.000**	**63.874.440**	**34,53**	**121.125.560**
5.1.1.1.6.2	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**	**35.000.000**	**11.056.120**	**31,59**	**23.943.880**
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	96.800.000	44.927.216	46,41	51.872.784
5.1.1.1.7.1	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**	**96.800.000**	**44.927.216**	**46,41**	**51.872.784**
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	400.000	20.891	5,22	379.109
5.1.1.1.8.1	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**	**300.000**	**17.217**	**5,74**	**282.783**
5.1.1.1.8.2	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**	**100.000**	**3.674**	**3,67**	**96.326**
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	380.000.000	119.804.705	31,53	260.195.295
5.1.1.1.9.1	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**	**335.000.000**	**107.636.697**	**32,13**	**227.363.303**
5.1.1.1.9.2	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**	**45.000.000**	**12.168.008**	**27,04**	**32.831.992**
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.500.000	2.911.243	30,64	6.588.757
5.1.1.1.10.1	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**	**7.500.000**	**2.359.955**	**31,47**	**5.140.045**
5.1.1.1.10.2	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**	**2.000.000**	**551.288**	**27,56**	**1.448.712**
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.000.000	8.733.790	32,35	18.266.210

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.1.11.1	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**	**22.000.000**	**7.079.990**	**32,18**	**14.920.010**
5.1.1.1.11.2	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**	**5.000.000**	**1.653.800**	**33,08**	**3.346.200**
5.1.1.1.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	71.472.000	0	0	71.472.000
5.1.1.1.12.1	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**	**56.684.000**	**0**	**0**	**56.684.000**
5.1.1.1.12.2	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK**	**14.788.000**	**0**	**0**	**14.788.000**
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.329.532.000	2.466.614.975	33,65	4.862.917.025
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.329.532.000	2.466.614.975	33,65	4.862.917.025
5.1.1.2.1.1	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**	**6.989.532.000**	**2.399.114.975**	**34,32**	**4.590.417.025**
5.1.1.2.1.2	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**	**340.000.000**	**67.500.000**	**19,85**	**272.500.000**
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.427.185.000	3.422.628.703	22,19	12.004.556.297
5.1.2.1	Belanja Barang	6.412.079.000	883.357.325	13,78	5.528.721.675
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	6.310.407.000	824.147.325	13,06	5.486.259.675
5.1.2.1.1.4	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**	**100.000.000**	**32.080.000**	**32,08**	**67.920.000**
5.1.2.1.1.9	**Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran**	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**
5.1.2.1.1.12	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**	**52.730.000**	**0**	**0**	**52.730.000**
5.1.2.1.1.24	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**	**241.682.500**	**143.380.325**	**59,33**	**98.302.175**
5.1.2.1.1.26	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak**	**327.295.500**	**71.317.000**	**21,79**	**255.978.500**
5.1.2.1.1.27	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**	**11.800.000**	**5.000.000**	**42,37**	**6.800.000**
5.1.2.1.1.31	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**	**33.000.000**	**33.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.1.35	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata**	**13.842.000**	**2.400.000**	**17,34**	**11.442.000**
5.1.2.1.1.36	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.1.39	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**	**208.000.000**	**0**	**0**	**208.000.000**
5.1.2.1.1.40	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**	**3.487.698.000**	**15.000.000**	**0,43**	**3.472.698.000**
5.1.2.1.1.52	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**	**1.787.121.000**	**507.647.000**	**28,41**	**1.279.474.000**
5.1.2.1.1.53	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**	**32.738.000**	**4.323.000**	**13,20**	**28.415.000**
5.1.2.1.1.64	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**	**1.500.000**	**0**	**0**	**1.500.000**
5.1.2.1.4	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	101.672.000	59.210.000	58,24	42.462.000
5.1.2.1.4.117	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat**	**16.702.000**	**10.315.000**	**61,76**	**6.387.000**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Kantor Lainnya				
5.1.2.1.4.137	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya**	**24.970.000**	**24.970.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.4.411	**Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**	**60.000.000**	**23.925.000**	**39,88**	**36.075.000**
5.1.2.2	Belanja Jasa	6.374.260.000	1.626.031.010	25,51	4.748.228.990
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	5.192.588.000	1.512.550.294	29,13	3.680.037.706
5.1.2.2.1.3	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**	**608.110.000**	**121.800.000**	**20,03**	**486.310.000**
5.1.2.2.1.4	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**	**17.100.000**	**0**	**0**	**17.100.000**
5.1.2.2.1.6	**Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**	**2.500.000**	**0**	**0**	**2.500.000**
5.1.2.2.1.25	**Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan**	**7.200.000**	**300.000**	**4,17**	**6.900.000**
5.1.2.2.1.29	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**	**1.172.313.000**	**282.780.475**	**24,12**	**889.532.525**
5.1.2.2.1.30	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**	**552.500.000**	**207.174.240**	**37,50**	**345.325.760**
5.1.2.2.1.31	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**	**709.800.000**	**275.202.340**	**38,77**	**434.597.660**
5.1.2.2.1.33	**Belanja Jasa Tenaga Supir**	**50.700.000**	**19.392.166**	**38,25**	**31.307.834**
5.1.2.2.1.34	**Belanja Jasa Tenaga Juru Masak**	**101.400.000**	**38.792.780**	**38,26**	**62.607.220**
5.1.2.2.1.46	**Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi**	**150.000.000**	**0**	**0**	**150.000.000**
5.1.2.2.1.59	**Belanja Tagihan Telepon**	**52.500.000**	**16.821.573**	**32,04**	**35.678.427**
5.1.2.2.1.60	**Belanja Tagihan Air**	**24.000.000**	**8.255.118**	**34,40**	**15.744.882**
5.1.2.2.1.61	**Belanja Tagihan Listrik**	**423.500.000**	**105.768.232**	**24,97**	**317.731.768**
5.1.2.2.1.67	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**	**31.050.000**	**4.342.000**	**13,98**	**26.708.000**
5.1.2.2.1.80	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**	**378.000.000**	**115.400.000**	**30,53**	**262.600.000**
5.1.2.2.1.81	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**	**8.000.000**	**2.000.000**	**25**	**6.000.000**
5.1.2.2.1.90	**Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional**	**903.915.000**	**314.521.370**	**34,80**	**589.393.630**
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	155.000.000	0	0	155.000.000
5.1.2.2.2.8	**Belanja Asuransi Barang Milik Daerah**	**155.000.000**	**0**	**0**	**155.000.000**
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.000.000	0	0	30.000.000
5.1.2.2.4.36	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**	**30.000.000**	**0**	**0**	**30.000.000**
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	44.000.000	0	0	44.000.000
5.1.2.2.5.25	**Belanja Sewa Bangunan Terbuka**	**44.000.000**	**0**	**0**	**44.000.000**
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	455.672.000	113.480.716	24,90	342.191.284

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.8.9	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi**	**258.698.000**	**113.480.716**	**43,87**	**145.217.284**
5.1.2.2.8.20	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi**	**196.974.000**	**0**	**0**	**196.974.000**
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	490.000.000	0	0	490.000.000
5.1.2.2.9.14	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**	**490.000.000**	**0**	**0**	**490.000.000**
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.000.000	0	0	7.000.000
5.1.2.2.12.1	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**	**7.000.000**	**0**	**0**	**7.000.000**
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	491.145.000	160.153.624	32,61	330.991.376
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	291.145.000	81.193.624	27,89	209.951.376
5.1.2.3.2.22	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set**	**14.500.000**	**7.560.000**	**52,14**	**6.940.000**
5.1.2.3.2.23	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa**	**5.300.000**	**0**	**0**	**5.300.000**
5.1.2.3.2.36	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**	**258.345.000**	**65.873.624**	**25,50**	**192.471.376**
5.1.2.3.2.118	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel**	**13.000.000**	**7.760.000**	**59,69**	**5.240.000**
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000	78.960.000	39,48	121.040.000
5.1.2.3.3.1	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**	**200.000.000**	**78.960.000**	**39,48**	**121.040.000**
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	2.149.701.000	753.086.744	35,03	1.396.614.256
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.149.701.000	753.086.744	35,03	1.396.614.256
5.1.2.4.1.1	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**	**2.149.701.000**	**753.086.744**	**35,03**	**1.396.614.256**
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000	2.112.000.000	21,12	7.888.000.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	10.000.000.000	2.112.000.000	21,12	7.888.000.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	10.000.000.000	2.112.000.000	21,12	7.888.000.000
5.1.6.1.2.1	**Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**	**10.000.000.000**	**2.112.000.000**	**21,12**	**7.888.000.000**
5.2	**BELANJA MODAL**	**314.860.000**	**64.860.000**	**20,60**	**250.000.000**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.860.000	64.860.000	100	0
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	49.920.000	49.920.000	100	0
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	49.920.000	49.920.000	100	0
5.2.2.5.2.4	**Belanja Modal Alat Pendingin**	**49.920.000**	**49.920.000**	**100**	**0**
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	14.940.000	14.940.000	100	0
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.940.000	14.940.000	100	0

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.2.10.2.4	**Belanja Modal Peralatan Jaringan**	**14.940.000**	**14.940.000**	**100**	**0**
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000	0	0	250.000.000
5.2.6.1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	250.000.000	0	0	250.000.000
5.2.6.1.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	250.000.000	0	0	250.000.000
5.2.6.1.1.5	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software**	**250.000.000**	**0**	**0**	**250.000.000**
	Jumlah Belanja	**39.110.989.000**	**10.091.243.417**	**25,80**	**29.019.745.583**
	Surplus/(Defisit)	**0**	**(10.091.243.417)**	**100**	**10.091.243.417**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**	**(10.091.243.417)**	**100**	**10.091.243.417**

Semarang, 30 April 2026

PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(MUSLICHAH SETIASIH, M.Eng., MMG, S.IP)

NIP. 19800901 201001 2 018

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 39.810.871.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 39.495.871.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 315.000.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Anggaran Belanja Perubahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 39.110.989.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 38.796.129.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 314.860.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 13.368.944.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.491.754.714,- dengan Presentasi 33.60 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 15.427.185.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.422.628.703,- dengan Presentasi 22.19 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.112.000.000,- dengan Presentasi 21.12 %.

Belanja Modal *:*

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 314.860.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 64.860.000,- dengan Presentasi 20.60 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 64.860.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 64.860.000,- dengan Presentasi 100 %; dan Belanja Modal Aset Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0%.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut, strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Fungsi :

Sub Fungsi :

Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	**39.110.989.000**	**10.091.243.417**	**29.019.745.583**	**25,80**
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**	**19.287.148.000**	**6.357.600.907**	**12.929.547.093**	**32,96**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**687.578.000**	**150.686.950**	**536.891.050**	**21,92**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	407.873.000	72.365.000	335.508.000,00	17,74
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	254.523.000	76.201.950	178.321.050,00	29,94
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	12.591.000	2.120.000	10.471.000,00	16,84
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12.591.000	-	12.591.000,00	-
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**13.834.827.000**	**4.635.276.314**	**9.199.550.686**	**33,50**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	13.368.944.000	4.491.754.714	8.877.189.286,00	33,60
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	386.000.000	117.400.000	268.600.000,00	30,41
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.968.000	6.715.000	38.253.000,00	14,93
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.521.000	4.497.600	23.400,00	99,48
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunanan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	26.200.000	12.294.000	13.906.000,00	46,92
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.194.000	2.615.000	1.579.000,00	62,35
	Kegiatan Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**167.520.000**	**5.169.000**	**162.351.000**	**3**
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.174.000	2.409.000	1.765.000,00	57,71
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	-	155.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.173.000	1.700.000	2.473.000,00	40,74
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4.173.000	1.060.000	3.113.000,00	25,40
	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**59.178.000**	**15.365.900**	**43.812.100**	**25,9655615**
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.793.000	375.000	8.418.000,00	4,26
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13.080.000	-	13.080.000,00	-
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	-	10.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11.641.000	-	11.641.000,00	-
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.664.000	14.990.900	673.100,00	95,70
	Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	**1.018.803.000**	**271.309.300**	**747.493.700**	**26,63**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	33.000.000	33.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000	28.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.000.000	10.000.000	3.000.000,00	76,92
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	32.080.000	67.920.000,00	32,08
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.018.000	8.535.000	1.483.000,00	85,20
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.738.000	6.723.000	69.015.000,00	8,88
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550.969.000	125.146.300	425.822.700,00	22,71
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	17.210.000	15.090.000	2.120.000,00	87,68
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	190.868.000	12.735.000	178.133.000,00	6,67
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**89.830.000**	**89.830.000**	**-**	**100**
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.830.000	89.830.000	-	100,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2.830.515.000**	**991.227.819**	**1.839.287.181**	**35,02**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000	130.844.923	369.155.077,00	26,17
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.325.515.000	855.382.896	1.470.132.104,00	36,78
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**598.897.000**	**198.735.624**	**400.161.376**	**33**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.395.000	10.424.124	78.970.876,00	11,66
	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	59.791.500	140.208.500,00	29,90
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	13.000.000	7.760.000	5.240.000,00	59,69
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	23.925.000	36.075.000,00	39,88
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	78.960.000	121.040.000,00	39,48
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.502.000	17.875.000	18.627.000,00	48,97

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
II.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**12.634.852.000**	**2.870.569.953**	**9.764.282.047**	**22,72**
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**148.772.000**	**57.648.475**	**91.123.525**	**38,75**
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	104.754.000	40.249.980	64.504.020,00	38,42
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	44.018.000	17.398.495	26.619.505,00	39,53
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**100.908.000**	**4.939.850**	**95.968.150**	**4,90**
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarekawan Tanggap Bencana	100.908.000	4.939.850	95.968.150,00	4,90
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**10.884.280.000**	**2.412.027.786**	**8.472.252.214**	**22,16**
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.622.963.000	572.088.355	1.050.874.645,00	35,25
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	3.984.304.000	54.810.710	3.929.493.290,00	1,38
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang terdampak Relokasi Program Provinsi	5.277.013.000	1.785.128.721	3.491.884.279,00	33,83
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**1.500.892.000**	**395.953.842**	**1.104.938.158**	**26,38**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Provinsi	1.500.892.000	395.953.842	1.104.938.158,00	26,38
III.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.968.241.000**	**222.332.000**	**1.745.909.000**	**11,30**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**141.352.000**	**35.150.500**	**106.201.500**	**24,87**
	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	141.352.000	35.150.500	106.201.500,00	24,87
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**1.826.889.000**	**187.181.500**	**1.639.707.500**	**10,25**
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	12.777.000	2.219.000	10.558.000,00	17,37
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	162.832.000	15.514.500	147.317.500,00	9,53
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	1.651.280.000	169.448.000	1.481.832.000,00	10,26
IV.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**2.652.532.000**	**127.333.716**	**2.525.198.284**	**4,80**
	Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Permukiman	**2.652.532.000**	**127.333.716**	**2.525.198.284**	**4,80**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	21.692.000	2.725.000	18.967.000,00	12,56
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	2.630.840.000	124.608.716	2.506.231.284,00	4,74
V.	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**237.960.000**	**68.079.000**	**169.881.000**	**28,61**
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	**237.960.000**	**68.079.000**	**169.881.000**	**28,61**
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	237.960.000	68.079.000	169.881.000,00	28,61
VI.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**458.084.000**	**89.433.000**	**368.651.000**	**19,52**
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**458.084.000**	**89.433.000**	**368.651.000**	**19,52**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	346.105.000	60.847.000	285.258.000,00	17,58
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	111.979.000	28.586.000	83.393.000,00	25,53
VII.	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**392.099.000**	**129.596.000**	**262.503.000**	**33,05**
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupataen/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**392.099.000**	**129.596.000**	**262.503.000**	**33,05**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	334.671.000	101.648.000	233.023.000,00	30,37
	Sub Kegiatan Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	57.428.000	27.948.000	29.480.000,00	48,67

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
VIII.	**PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**323.099.000**	**105.352.659**	**217.746.341**	**32,61**
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Ulitilas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	**323.099.000**	**105.352.659**	**217.746.341**	**32,61**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkonisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kialifikasi Menengah	323.099.000	105.352.659	217.746.341,00	32,61
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**1.156.974.000**	**120.946.182**	**1.036.027.818**	**10,45**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**1.156.974.000**	**120.946.182**	**1.036.027.818**	**10,45**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	713.191.000	54.251.982	658.939.018,00	7,61
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	443.783.000	66.694.200	377.088.800,00	15,03
	JUMLAH	**39.110.989.000**	**10.091.243.417**	**29.019.745.583**	**25,80**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144
Telepon (024) 76008247 Faksimile (024) 7608202
Laman https://www.disperakim.jatengprov.go.id , Pos-el disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Yth.	:	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Dari	:	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tembusan	:	-
Tanggal	:	01 April 2026
Nomor	:	037/KEU/IV/2026
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	-
Hal	:	Permohonan Asmanan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2026 Bulan Maret

Berikut kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Bulan Maret.

Bersama ini mohon dengan hormat asmanan Bapak untuk Laporan tersebut (terlampir).

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Muslichah Setiasih, S.IP, MMG, M.Eng
Pembina
NIP. 19800901 201001 2 018

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

BULAN MARET

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Bulan Maret pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Maret 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Boedyo Dharmawan, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 199803 1 003

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2026 bulan Maret sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, Maret 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Boedyo Dharmawan, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 199803 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntanbilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sistematis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntanbilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen

   Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan

   Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.31/508 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2026 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja Murni sebesar Rp. 39.810.871.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 39.495.871.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 315.000.000,- dan menjadi Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp. 39.110.989.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 38.796.129.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 314.860.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 19 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Tujuan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah **"Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Lestari"** dengan 4 (empat) sasaran yaitu :

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis
2. Perekonomian Tangguh yang Berdaya saing dan Berkelanjutan
3. SDM Berdaya Saing, Berkarakter dan Adaptif
4. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Gubernur pada periode perencanaan jangka menengah transisi 2024-2026 serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Kawasan Permukiman;
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
4. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;

5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
6. Program Redistrubusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2026
periode 1 Januari s.d 31 Maret 2026

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	**BELANJA DAERAH**	**39.110.989.000**	**6.881.016.998**	**17,59**	**32.229.972.002**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**38.796.129.000**	**6.816.156.998**	**17,57**	**31.979.972.002**
5.1.1	Belanja Pegawai	13.368.944.000	3.612.385.800	27,02	9.756.558.200
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.039.412.000	1.625.851.907	26,92	4.413.560.093
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.455.700.000	1.210.095.369	27,16	3.245.604.631
5.1.1.1.1.1	**Belanja Gaji Pokok PNS**	**3.638.000.000**	**986.046.100**	**27,10**	**2.651.953.900**
5.1.1.1.1.2	**Belanja Gaji Pokok PPPK**	**817.700.000**	**224.049.269**	**27,40**	**593.650.731**
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	381.000.000	104.103.611	27,32	276.896.389
5.1.1.1.2.1	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**	**343.500.000**	**93.861.130**	**27,32**	**249.638.870**
5.1.1.1.2.2	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**	**37.500.000**	**10.242.481**	**27,31**	**27.257.519**
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	176.540.000	48.820.000	27,65	127.720.000
5.1.1.1.3.1	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**	**176.540.000**	**48.820.000**	**27,65**	**127.720.000**
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	135.500.000	35.575.000	26,25	99.925.000
5.1.1.1.4.1	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**	**100.000.000**	**25.535.000**	**25,54**	**74.465.000**
5.1.1.1.4.2	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**	**35.500.000**	**10.040.000**	**28,28**	**25.460.000**
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	85.500.000	23.790.000	27,82	61.710.000
5.1.1.1.5.1	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**	**85.500.000**	**23.790.000**	**27,82**	**61.710.000**
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	220.000.000	60.012.040	27,28	159.987.960
5.1.1.1.6.1	**Belanja Tunjangan Beras PNS**	**185.000.000**	**51.200.940**	**27,68**	**133.799.060**
5.1.1.1.6.2	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**	**35.000.000**	**8.811.100**	**25,17**	**26.188.900**
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	96.800.000	44.501.175	45,97	52.298.825
5.1.1.1.7.1	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**	**96.800.000**	**44.501.175**	**45,97**	**52.298.825**
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	400.000	16.681	4,17	383.319
5.1.1.1.8.1	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**	**300.000**	**13.754**	**4,58**	**286.246**
5.1.1.1.8.2	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**	**100.000**	**2.927**	**2,93**	**97.073**
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	380.000.000	90.162.073	23,73	289.837.927
5.1.1.1.9.1	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**	**335.000.000**	**81.054.964**	**24,20**	**253.945.036**
5.1.1.1.9.2	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**	**45.000.000**	**9.107.109**	**20,24**	**35.892.891**
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.500.000	2.193.978	23,09	7.306.022
5.1.1.1.10.1	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**	**7.500.000**	**1.781.588**	**23,75**	**5.718.412**
5.1.1.1.10.2	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**	**2.000.000**	**412.390**	**20,62**	**1.587.610**
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.000.000	6.581.980	24,38	20.418.020

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.1.11.1	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**	**22.000.000**	**5.344.858**	**24,29**	**16.655.142**
5.1.1.1.11.2	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**	**5.000.000**	**1.237.122**	**24,74**	**3.762.878**
5.1.1.1.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	71.472.000	0	0	71.472.000
5.1.1.1.12.1	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**	**56.684.000**	**0**	**0**	**56.684.000**
5.1.1.1.12.2	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK**	**14.788.000**	**0**	**0**	**14.788.000**
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.329.532.000	1.986.533.893	27,10	5.342.998.107
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.329.532.000	1.986.533.893	27,10	5.342.998.107
5.1.1.2.1.1	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**	**6.989.532.000**	**1.932.533.893**	**27,65**	**5.056.998.107**
5.1.1.2.1.2	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**	**340.000.000**	**54.000.000**	**15,88**	**286.000.000**
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.427.185.000	2.499.771.198	16,20	12.927.413.802
5.1.2.1	Belanja Barang	6.412.079.000	704.707.175	10,99	5.707.371.825
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	6.310.407.000	653.922.175	10,36	5.656.484.825
5.1.2.1.1.4	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**	**100.000.000**	**25.580.000**	**25,58**	**74.420.000**
5.1.2.1.1.9	**Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran**	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**
5.1.2.1.1.12	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**	**52.730.000**	**0**	**0**	**52.730.000**
5.1.2.1.1.24	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**	**241.682.500**	**124.839.175**	**51,65**	**116.843.325**
5.1.2.1.1.26	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak**	**327.295.500**	**62.285.000**	**19,03**	**265.010.500**
5.1.2.1.1.27	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**	**11.800.000**	**5.000.000**	**42,37**	**6.800.000**
5.1.2.1.1.31	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**	**33.000.000**	**33.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.1.35	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata**	**13.842.000**	**2.400.000**	**17,34**	**11.442.000**
5.1.2.1.1.36	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.1.39	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**	**208.000.000**	**0**	**0**	**208.000.000**
5.1.2.1.1.40	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**	**3.487.698.000**	**5.000.000**	**0,14**	**3.482.698.000**
5.1.2.1.1.52	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**	**1.787.121.000**	**382.956.000**	**21,43**	**1.404.165.000**
5.1.2.1.1.53	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**	**32.738.000**	**2.862.000**	**8,74**	**29.876.000**
5.1.2.1.1.64	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**	**1.500.000**	**0**	**0**	**1.500.000**
5.1.2.1.4	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	101.672.000	50.785.000	49,95	50.887.000
5.1.2.1.4.117	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat**	**16.702.000**	**8.415.000**	**50,38**	**8.287.000**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Kantor Lainnya				
5.1.2.1.4.137	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya**	**24.970.000**	**24.970.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.4.411	**Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**	**60.000.000**	**17.400.000**	**29**	**42.600.000**
5.1.2.2	Belanja Jasa	6.374.260.000	1.123.825.883	17,63	5.250.434.117
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	5.192.588.000	1.067.950.348	20,57	4.124.637.652
5.1.2.2.1.3	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**	**608.110.000**	**76.000.000**	**12,50**	**532.110.000**
5.1.2.2.1.4	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**	**17.100.000**	**0**	**0**	**17.100.000**
5.1.2.2.1.6	**Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**	**2.500.000**	**0**	**0**	**2.500.000**
5.1.2.2.1.25	**Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan**	**7.200.000**	**300.000**	**4,17**	**6.900.000**
5.1.2.2.1.29	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**	**1.172.313.000**	**136.504.050**	**11,64**	**1.035.808.950**
5.1.2.2.1.30	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**	**552.500.000**	**164.020.680**	**29,69**	**388.479.320**
5.1.2.2.1.31	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**	**709.800.000**	**220.918.140**	**31,12**	**488.881.860**
5.1.2.2.1.33	**Belanja Jasa Tenaga Supir**	**50.700.000**	**15.482.217**	**30,54**	**35.217.783**
5.1.2.2.1.34	**Belanja Jasa Tenaga Juru Masak**	**101.400.000**	**30.970.770**	**30,54**	**70.429.230**
5.1.2.2.1.46	**Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi**	**150.000.000**	**0**	**0**	**150.000.000**
5.1.2.2.1.59	**Belanja Tagihan Telepon**	**52.500.000**	**11.747.107**	**22,38**	**40.752.893**
5.1.2.2.1.60	**Belanja Tagihan Air**	**24.000.000**	**6.126.834**	**25,53**	**17.873.166**
5.1.2.2.1.61	**Belanja Tagihan Listrik**	**423.500.000**	**78.437.271**	**18,52**	**345.062.729**
5.1.2.2.1.67	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**	**31.050.000**	**0**	**0**	**31.050.000**
5.1.2.2.1.80	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**	**378.000.000**	**86.550.000**	**22,90**	**291.450.000**
5.1.2.2.1.81	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**	**8.000.000**	**2.000.000**	**25**	**6.000.000**
5.1.2.2.1.90	**Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional**	**903.915.000**	**238.893.279**	**26,43**	**665.021.721**
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	155.000.000	0	0	155.000.000
5.1.2.2.2.8	**Belanja Asuransi Barang Milik Daerah**	**155.000.000**	**0**	**0**	**155.000.000**
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.000.000	0	0	30.000.000
5.1.2.2.4.36	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**	**30.000.000**	**0**	**0**	**30.000.000**
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	44.000.000	0	0	44.000.000
5.1.2.2.5.25	**Belanja Sewa Bangunan Terbuka**	**44.000.000**	**0**	**0**	**44.000.000**
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	455.672.000	55.875.535	12,26	399.796.465

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.8.9	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi**	**258.698.000**	**55.875.535**	**21,60**	**202.822.465**
5.1.2.2.8.20	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi**	**196.974.000**	**0**	**0**	**196.974.000**
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	490.000.000	0	0	490.000.000
5.1.2.2.9.14	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**	**490.000.000**	**0**	**0**	**490.000.000**
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.000.000	0	0	7.000.000
5.1.2.2.12.1	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**	**7.000.000**	**0**	**0**	**7.000.000**
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	491.145.000	105.569.624	21,49	385.575.376
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	291.145.000	58.929.624	20,24	232.215.376
5.1.2.3.2.22	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set**	**14.500.000**	**0**	**0**	**14.500.000**
5.1.2.3.2.23	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa**	**5.300.000**	**0**	**0**	**5.300.000**
5.1.2.3.2.36	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**	**258.345.000**	**51.169.624**	**19,81**	**207.175.376**
5.1.2.3.2.118	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel**	**13.000.000**	**7.760.000**	**59,69**	**5.240.000**
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000	46.640.000	23,32	153.360.000
5.1.2.3.3.1	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**	**200.000.000**	**46.640.000**	**23,32**	**153.360.000**
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	2.149.701.000	565.668.516	26,31	1.584.032.484
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.149.701.000	565.668.516	26,31	1.584.032.484
5.1.2.4.1.1	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**	**2.149.701.000**	**565.668.516**	**26,31**	**1.584.032.484**
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000	704.000.000	7,04	9.296.000.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	10.000.000.000	704.000.000	7,04	9.296.000.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	10.000.000.000	704.000.000	7,04	9.296.000.000
5.1.6.1.2.1	**Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**	**10.000.000.000**	**704.000.000**	**7,04**	**9.296.000.000**
5.2	**BELANJA MODAL**	**314.860.000**	**64.860.000**	**20,60**	**250.000.000**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.860.000	64.860.000	100	0
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	49.920.000	49.920.000	100	0
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	49.920.000	49.920.000	100	0
5.2.2.5.2.4	**Belanja Modal Alat Pendingin**	**49.920.000**	**49.920.000**	**100**	**0**
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	14.940.000	14.940.000	100	0
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.940.000	14.940.000	100	0

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.2.10.2.4	**Belanja Modal Peralatan Jaringan**	**14.940.000**	**14.940.000**	**100**	**0**
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000	0	0	250.000.000
5.2.6.1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	250.000.000	0	0	250.000.000
5.2.6.1.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	250.000.000	0	0	250.000.000
5.2.6.1.1.5	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software**	**250.000.000**	**0**	**0**	**250.000.000**
	Jumlah Belanja	**39.110.989.000**	**6.881.016.998**	**17,59**	**32.229.972.002**
	Surplus/(Defisit)	**0**	**(6.881.016.998)**	**100**	**6.881.016.998**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**	**(6.881.016.998)**	**100**	**6.881.016.998**

Semarang, 31 Maret 2026

PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(MUSLICHAH SETIASIH, M.Eng., MMG, S.IP)

NIP. 19800901 201001 2 018

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 39.810.871.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 39.495.871.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 315.000.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Anggaran Belanja Perubahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 39.110.989.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 38.796.129.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 314.860.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 13.368.944.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.612.385.800,- dengan Presentasi 27.02 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 15.427.185.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.499.771.198,- dengan Presentasi 16.20 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 704.000.000,- dengan Presentasi 7.04 %.

Belanja Modal *:*

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 314.860.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 64.860.000,- dengan Presentasi 20.60 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 64.860.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 64.860.000,- dengan Presentasi 100 %; dan Belanja Modal Aset Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0%.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut, strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Fungsi :

Sub Fungsi :

Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	**39.110.989.000**	**6.881.016.998**	**32.229.972.002**	**17,59**
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**	**19.287.148.000**	**5.064.987.272**	**14.222.160.728**	**26,26**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**687.578.000**	**99.856.950**	**587.721.050**	**14,52**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	407.873.000	51.993.500	355.879.500,00	12,75
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	254.523.000	45.743.450	208.779.550,00	17,97
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	12.591.000	2.120.000	10.471.000,00	16,84
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12.591.000	-	12.591.000,00	-
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**13.834.827.000**	**3.725.756.400**	**10.109.070.600**	**26,93**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	13.368.944.000	3.612.385.800	9.756.558.200,00	27,02
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	386.000.000	88.550.000	297.450.000,00	22,94
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.968.000	6.715.000	38.253.000,00	14,93
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.521.000	4.497.600	23.400,00	99,48
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunanan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	26.200.000	10.993.000	15.207.000,00	41,96
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.194.000	2.615.000	1.579.000,00	62,35
	Kegiatan Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**167.520.000**	**2.409.000**	**165.111.000**	**1**
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.174.000	2.409.000	1.765.000,00	57,71
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	-	155.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.173.000	-	4.173.000,00	-
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4.173.000	-	4.173.000,00	-
	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**59.178.000**	**15.365.900**	**43.812.100**	**25,9655615**
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.793.000	375.000	8.418.000,00	4,26
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13.080.000	-	13.080.000,00	-
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	-	10.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11.641.000	-	11.641.000,00	-
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.664.000	14.990.900	673.100,00	95,70
	Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	**1.018.803.000**	**228.488.100**	**790.314.900**	**22,43**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	33.000.000	33.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000	28.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.000.000	10.000.000	3.000.000,00	76,92
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	25.580.000	74.420.000,00	25,58
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.018.000	8.535.000	1.483.000,00	85,20
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.738.000	5.262.000	70.476.000,00	6,95
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550.969.000	97.776.100	453.192.900,00	17,75
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	17.210.000	13.765.000	3.445.000,00	79,98
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	190.868.000	6.570.000	184.298.000,00	3,44
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**89.830.000**	**89.830.000**	**-**	**100**
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.830.000	89.830.000	-	100,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2.830.515.000**	**771.896.298**	**2.058.618.702**	**27,27**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000	96.311.212	403.688.788,00	19,26
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.325.515.000	670.585.086	1.654.929.914,00	28,84
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**598.897.000**	**131.384.624**	**467.512.376**	**22**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.395.000	10.424.124	78.970.876,00	11,66
	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	40.745.500	159.254.500,00	20,37
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	13.000.000	7.760.000	5.240.000,00	59,69
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	17.400.000	42.600.000,00	29,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	46.640.000	153.360.000,00	23,32
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.502.000	8.415.000	28.087.000,00	23,05

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
II.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**12.634.852.000**	**1.193.514.594**	**11.441.337.406**	**9,45**
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**148.772.000**	**42.279.430**	**106.492.570**	**28,42**
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	104.754.000	31.985.570	72.768.430,00	30,53
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	44.018.000	10.293.860	33.724.140,00	23,39
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**100.908.000**	**4.939.850**	**95.968.150**	**4,90**
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarekawan Tanggap Bencana	100.908.000	4.939.850	95.968.150,00	4,90
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**10.884.280.000**	**915.281.456**	**9.968.998.544**	**8,41**
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.622.963.000	32.344.535	1.590.618.465,00	1,99
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	3.984.304.000	42.080.710	3.942.223.290,00	1,06
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang terdampak Relokasi Program Provinsi	5.277.013.000	840.856.211	4.436.156.789,00	15,93
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**1.500.892.000**	**231.013.858**	**1.269.878.142**	**15,39**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Provinsi	1.500.892.000	231.013.858	1.269.878.142,00	15,39
III.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.968.241.000**	**201.679.000**	**1.766.562.000**	**10,25**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**141.352.000**	**26.456.000**	**114.896.000**	**18,72**
	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	141.352.000	26.456.000	114.896.000,00	18,72
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**1.826.889.000**	**175.223.000**	**1.651.666.000**	**9,59**
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	12.777.000	1.424.000	11.353.000,00	11,15
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	162.832.000	9.764.500	153.067.500,00	6,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	1.651.280.000	164.034.500	1.487.245.500,00	9,93
IV.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**2.652.532.000**	**63.593.535**	**2.588.938.465**	**2,40**
	Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Permukiman	**2.652.532.000**	**63.593.535**	**2.588.938.465**	**2,40**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	21.692.000	795.000	20.897.000,00	3,66
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	2.630.840.000	62.798.535	2.568.041.465,00	2,39
V.	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**237.960.000**	**51.180.000**	**186.780.000**	**21,51**
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	**237.960.000**	**51.180.000**	**186.780.000**	**21,51**
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	237.960.000	51.180.000	186.780.000,00	21,51
VI.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**458.084.000**	**79.349.000**	**378.735.000**	**17,32**
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**458.084.000**	**79.349.000**	**378.735.000**	**17,32**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	346.105.000	55.801.000	290.304.000,00	16,12
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	111.979.000	23.548.000	88.431.000,00	21,03
VII.	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**392.099.000**	**59.226.000**	**332.873.000**	**15,10**
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupataen/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**392.099.000**	**59.226.000**	**332.873.000**	**15,10**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	334.671.000	42.208.000	292.463.000,00	12,61
	Sub Kegiatan Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	57.428.000	17.018.000	40.410.000,00	29,63

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
VIII.	**PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**323.099.000**	**80.642.115**	**242.456.885**	**24,96**
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Ulitilas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	**323.099.000**	**80.642.115**	**242.456.885**	**24,96**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkonisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kialifikasi Menengah	323.099.000	80.642.115	242.456.885,00	24,96
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**1.156.974.000**	**86.845.482**	**1.070.128.518**	**7,51**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**1.156.974.000**	**86.845.482**	**1.070.128.518**	**7,51**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	713.191.000	35.550.982	677.640.018,00	4,98
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	443.783.000	51.294.500	392.488.500,00	11,56
JUMLAH		**39.110.989.000**	**6.881.016.998**	**32.229.972.002**	**17,59**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144
Telepon (024) 76008247 Faksimile (024) 7608202
Laman : http://www.jatengprov.go.id Pos-el : disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Yth.	:	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Dari	:	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tembusan	:	-
Tanggal	:	02 Maret 2026
Nomor	:	031/KEU/III/2026
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	-
Hal	:	Permohonan Asmanan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2026 Bulan Februari

Berikut kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Bulan Februari.

Bersama ini mohon dengan hormat asmanan Bapak untuk Laporan tersebut (terlampir).

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Muslichah Setiasih, S.IP, MMG, M.Eng
Pembina
NIP. 19800901 201001 2 018

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

BULAN FEBRUARI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Bulan Februari pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Februari 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Boedyo Dharmawan, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 199803 1 003

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2026 bulan Februari sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, Februari 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Boedyo Dharmawan, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 199803 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntanbilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sistematis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntanbilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen

   Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan

   Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.31/508 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2026 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja Murni sebesar Rp. 39.810.871.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 39.495.871.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 315.000.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 19 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Tujuan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah **"Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Lestari"** dengan 4 (empat) sasaran yaitu :

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis
2. Perekonomian Tangguh yang Berdaya saing dan Berkelanjutan
3. SDM Berdaya Saing, Berkarakter dan Adaptif
4. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Gubernur pada periode perencanaan jangka menengah transisi 2024-2026 serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Kawasan Permukiman;
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
4. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;

6. Program Redistrubusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2026
periode 1 Januari s.d 28 Februari 2026

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	**BELANJA DAERAH**	**39.810.871.000**	**3.418.924.526**	**8,59**	**36.391.946.474**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**39.495.871.000**	**3.354.064.526**	**8,49**	**36.141.806.474**
5.1.1	Belanja Pegawai	13.368.944.000	1.789.878.369	13,39	11.579.065.631
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.039.412.000	815.413.734	13,50	5.223.998.266
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.455.700.000	611.177.800	13,72	3.844.522.200
5.1.1.1.1.1	**Belanja Gaji Pokok PNS**	**3.638.000.000**	**497.227.400**	**13,67**	**3.140.772.600**
5.1.1.1.1.2	**Belanja Gaji Pokok PPPK**	**817.700.000**	**113.950.400**	**13,94**	**703.749.600**
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	381.000.000	52.393.206	13,75	328.606.794
5.1.1.1.2.1	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**	**343.500.000**	**47.208.262**	**13,74**	**296.291.738**
5.1.1.1.2.2	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**	**37.500.000**	**5.184.944**	**13,83**	**32.315.056**
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	176.540.000	24.680.000	13,98	151.860.000
5.1.1.1.3.1	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**	**176.540.000**	**24.680.000**	**13,98**	**151.860.000**
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	135.500.000	17.925.000	13,23	117.575.000
5.1.1.1.4.1	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**	**100.000.000**	**12.905.000**	**12,91**	**87.095.000**
5.1.1.1.4.2	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**	**35.500.000**	**5.020.000**	**14,14**	**30.480.000**
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	85.500.000	11.985.000	14,02	73.515.000
5.1.1.1.5.1	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**	**85.500.000**	**11.985.000**	**14,02**	**73.515.000**
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	220.000.000	30.199.140	13,73	189.800.860
5.1.1.1.6.1	**Belanja Tunjangan Beras PNS**	**185.000.000**	**25.709.100**	**13,90**	**159.290.900**
5.1.1.1.6.2	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**	**35.000.000**	**4.490.040**	**12,83**	**30.509.960**
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	96.800.000	856.133	0,88	95.943.867
5.1.1.1.7.1	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**	**96.800.000**	**856.133**	**0,88**	**95.943.867**
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	400.000	7.860	1,97	392.140
5.1.1.1.8.1	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**	**300.000**	**6.690**	**2,23**	**293.310**
5.1.1.1.8.2	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**	**100.000**	**1.170**	**1,17**	**98.830**
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	380.000.000	60.322.291	15,87	319.677.709
5.1.1.1.9.1	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**	**335.000.000**	**54.276.081**	**16,20**	**280.723.919**
5.1.1.1.9.2	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**	**45.000.000**	**6.046.210**	**13,44**	**38.953.790**
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.500.000	1.466.817	15,44	8.033.183
5.1.1.1.10.1	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**	**7.500.000**	**1.193.325**	**15,91**	**6.306.675**
5.1.1.1.10.2	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**	**2.000.000**	**273.492**	**13,67**	**1.726.508**
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.000.000	4.400.487	16,30	22.599.513
5.1.1.1.11.1	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**	**22.000.000**	**3.580.043**	**16,27**	**18.419.957**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.1.11.2	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**	**5.000.000**	**820.444**	**16,41**	**4.179.556**
5.1.1.1.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	71.472.000	0	0	71.472.000
5.1.1.1.12.1	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**	**56.684.000**	**0**	**0**	**56.684.000**
5.1.1.1.12.2	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK**	**14.788.000**	**0**	**0**	**14.788.000**
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.329.532.000	974.464.635	13,30	6.355.067.365
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.329.532.000	974.464.635	13,30	6.355.067.365
5.1.1.2.1.1	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**	**6.989.532.000**	**947.464.635**	**13,56**	**6.042.067.365**
5.1.1.2.1.2	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**	**340.000.000**	**27.000.000**	**7,94**	**313.000.000**
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.126.927.000	1.564.186.157	9,70	14.562.740.843
5.1.2.1	Belanja Barang	6.885.553.000	540.716.575	7,85	6.344.836.425
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	6.778.353.000	500.931.575	7,39	6.277.421.425
5.1.2.1.1.4	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**	**100.000.000**	**16.630.000**	**16,63**	**83.370.000**
5.1.2.1.1.9	**Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran**	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**
5.1.2.1.1.12	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**	**55.000.000**	**0**	**0**	**55.000.000**
5.1.2.1.1.24	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**	**263.709.000**	**109.872.575**	**41,66**	**153.836.425**
5.1.2.1.1.26	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**	**390.426.000**	**44.903.000**	**11,50**	**345.523.000**
5.1.2.1.1.27	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**	**11.800.000**	**5.000.000**	**42,37**	**6.800.000**
5.1.2.1.1.31	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**	**33.000.000**	**33.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.1.35	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**	**15.600.000**	**2.400.000**	**15,38**	**13.200.000**
5.1.2.1.1.36	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**	**10.000.000**	**9.520.000**	**95,20**	**480.000**
5.1.2.1.1.39	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**	**208.000.000**	**0**	**0**	**208.000.000**
5.1.2.1.1.40	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**	**3.487.698.000**	**0**	**0**	**3.487.698.000**
5.1.2.1.1.52	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**	**2.164.420.000**	**276.744.000**	**12,79**	**1.887.676.000**
5.1.2.1.1.53	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**	**34.200.000**	**2.862.000**	**8,37**	**31.338.000**
5.1.2.1.1.64	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**	**1.500.000**	**0**	**0**	**1.500.000**
5.1.2.1.4	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	107.200.000	39.785.000	37,11	67.415.000
5.1.2.1.4.117	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**	**22.200.000**	**5.010.000**	**22,57**	**17.190.000**
5.1.2.1.4.137	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-**	**25.000.000**	**24.970.000**	**99,88**	**30.000**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Alat Studio Lainnya				
5.1.2.1.4.411	**Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**	**60.000.000**	**9.805.000**	**16,34**	**50.195.000**
5.1.2.2	Belanja Jasa	6.407.450.000	624.324.843	9,74	5.783.125.157
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	5.225.778.000	624.324.843	11,95	4.601.453.157
5.1.2.2.1.3	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**	**641.300.000**	**53.000.000**	**8,26**	**588.300.000**
5.1.2.2.1.4	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**	**17.100.000**	**0**	**0**	**17.100.000**
5.1.2.2.1.6	**Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**	**2.500.000**	**0**	**0**	**2.500.000**
5.1.2.2.1.25	**Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan**	**7.200.000**	**300.000**	**4,17**	**6.900.000**
5.1.2.2.1.29	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**	**1.172.313.000**	**0**	**0**	**1.172.313.000**
5.1.2.2.1.30	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**	**552.500.000**	**120.867.120**	**21,88**	**431.632.880**
5.1.2.2.1.31	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**	**709.800.000**	**156.952.400**	**22,11**	**552.847.600**
5.1.2.2.1.33	**Belanja Jasa Tenaga Supir**	**50.700.000**	**3.909.949**	**7,71**	**46.790.051**
5.1.2.2.1.34	**Belanja Jasa Tenaga Juru Masak**	**101.400.000**	**7.822.010**	**7,71**	**93.577.990**
5.1.2.2.1.46	**Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi**	**150.000.000**	**0**	**0**	**150.000.000**
5.1.2.2.1.59	**Belanja Tagihan Telepon**	**52.500.000**	**8.405.101**	**16,01**	**44.094.899**
5.1.2.2.1.60	**Belanja Tagihan Air**	**24.000.000**	**4.814.234**	**20,06**	**19.185.766**
5.1.2.2.1.61	**Belanja Tagihan Listrik**	**423.500.000**	**59.297.847**	**14**	**364.202.153**
5.1.2.2.1.67	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**	**31.050.000**	**0**	**0**	**31.050.000**
5.1.2.2.1.80	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**	**378.000.000**	**57.700.000**	**15,26**	**320.300.000**
5.1.2.2.1.81	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**	**8.000.000**	**0**	**0**	**8.000.000**
5.1.2.2.1.90	**Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional**	**903.915.000**	**151.256.182**	**16,73**	**752.658.818**
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	155.000.000	0	0	155.000.000
5.1.2.2.2.8	**Belanja Asuransi Barang Milik Daerah**	**155.000.000**	**0**	**0**	**155.000.000**
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.000.000	0	0	30.000.000
5.1.2.2.4.36	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**	**30.000.000**	**0**	**0**	**30.000.000**
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	44.000.000	0	0	44.000.000
5.1.2.2.5.25	**Belanja Sewa Bangunan Terbuka**	**44.000.000**	**0**	**0**	**44.000.000**
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	455.672.000	0	0	455.672.000
5.1.2.2.8.9	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi**	**258.698.000**	**0**	**0**	**258.698.000**
5.1.2.2.8.20	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi**	**196.974.000**	**0**	**0**	**196.974.000**
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	490.000.000	0	0	490.000.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.9.14	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**	**490.000.000**	**0**	**0**	**490.000.000**
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.000.000	0	0	7.000.000
5.1.2.2.12.1	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**	**7.000.000**	**0**	**0**	**7.000.000**
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	491.145.000	62.165.500	12,66	428.979.500
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	291.145.000	29.925.500	10,28	261.219.500
5.1.2.3.2.22	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set**	**14.500.000**	**0**	**0**	**14.500.000**
5.1.2.3.2.23	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa**	**5.300.000**	**0**	**0**	**5.300.000**
5.1.2.3.2.36	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**	**258.345.000**	**29.925.500**	**11,58**	**228.419.500**
5.1.2.3.2.118	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel**	**13.000.000**	**0**	**0**	**13.000.000**
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000	32.240.000	16,12	167.760.000
5.1.2.3.3.1	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**	**200.000.000**	**32.240.000**	**16,12**	**167.760.000**
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	2.342.779.000	336.979.239	14,38	2.005.799.761
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.342.779.000	336.979.239	14,38	2.005.799.761
5.1.2.4.1.1	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**	**2.342.779.000**	**336.979.239**	**14,38**	**2.005.799.761**
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000
5.1.6.1.2.1	**Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**	**10.000.000.000**	**0**	**0**	**10.000.000.000**
5.2	**BELANJA MODAL**	**315.000.000**	**64.860.000**	**20,59**	**250.140.000**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.000.000	64.860.000	99,78	140.000
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	50.000.000	49.920.000	99,84	80.000
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	50.000.000	49.920.000	99,84	80.000
5.2.2.5.2.4	**Belanja Modal Alat Pendingin**	**50.000.000**	**49.920.000**	**99,84**	**80.000**
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	15.000.000	14.940.000	99,60	60.000
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	15.000.000	14.940.000	99,60	60.000
5.2.2.10.2.4	**Belanja Modal Peralatan Jaringan**	**15.000.000**	**14.940.000**	**99,60**	**60.000**
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000	0	0	250.000.000
5.2.6.1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	250.000.000	0	0	250.000.000
5.2.6.1.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	250.000.000	0	0	250.000.000
5.2.6.1.1.5	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software**	**250.000.000**	**0**	**0**	**250.000.000**
	Jumlah Belanja	**39.810.871.000**	**3.418.924.526**	**8,59**	**36.391.946.474**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Surplus/(Defisit)	**0**	**(3.418.924.526)**	**100**	**3.418.924.526**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**	**(3.418.924.526)**	**100**	**3.418.924.526**

Semarang, 28 Februari 2026

PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(MUSLICHAH SETIASIH, M.Eng., MMG, S.IP)

NIP. 19800901 201001 2 018

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 39.810.871.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 39.495.871.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 315.000.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 13.368.944.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.789.878.369,- dengan Presentasi 13.39 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 16.126.927.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.564.186.157,- dengan Presentasi 9.70 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0 %.

Belanja Modal *:*

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 315.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 64.860.000,- dengan Presentasi 20.59 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 64.860.000,- dengan Presentasi 99.78 %; dan Belanja Modal Aset Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0%.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut, strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Fungsi :

Sub Fungsi :

Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	**39.810.871.000**	**3.418.924.526**	**36.391.946.474**	**8,59**
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**	**19.491.548.000**	**2.767.658.862**	**16.723.889.138**	**14,20**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**774.389.000**	**43.767.450**	**730.621.550**	**5,65**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	452.234.000	27.605.500	424.628.500,00	6,10
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	292.155.000	16.161.950	275.993.050,00	5,53
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	15.000.000	-	15.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	15.000.000	-	15.000.000,00	-
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**13.844.944.000**	**1.864.331.369**	**11.980.612.631**	**13,47**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	13.368.944.000	1.789.878.369	11.579.065.631,00	13,39
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	386.000.000	57.700.000	328.300.000,00	14,95
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	-	50.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	3.145.000	1.855.000,00	62,90
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunanan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	30.000.000	10.993.000	19.007.000,00	36,64
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	2.615.000	2.385.000,00	52,30
	Kegiatan Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**170.000.000**	**1.590.000**	**168.410.000**	**1**
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	1.590.000	3.410.000,00	31,80
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	-	155.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	-	5.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	-	5.000.000,00	-
	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**62.305.000**	**375.000**	**61.930.000**	**0,60187786**
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	375.000	9.625.000,00	3,75
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.000.000	-	15.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	-	10.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11.641.000	-	11.641.000,00	-
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.664.000	-	15.664.000,00	-
	Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	**1.115.000.000**	**172.159.700**	**942.840.300**	**15,44**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	33.000.000	33.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000	28.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.000.000	9.520.000	3.480.000,00	73,23
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	16.630.000	83.370.000,00	16,63
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000	8.535.000	3.465.000,00	71,13
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	78.000.000	5.262.000	72.738.000,00	6,75
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	630.000.000	55.152.700	574.847.300,00	8,75
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21.000.000	12.440.000	8.560.000,00	59,24
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.000.000	3.620.000	196.380.000,00	1,81
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**90.000.000**	**89.830.000**	**170.000**	**100**
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000	89.830.000	170.000,00	99,81
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2.830.515.000**	**518.624.843**	**2.311.890.157**	**18,32**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000	72.517.182	427.482.818,00	14,50
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.325.515.000	441.107.661	1.884.407.339,00	18,97
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**604.395.000**	**76.980.500**	**527.414.500**	**13**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.395.000	-	89.395.000,00	-
	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	29.925.500	170.074.500,00	14,96
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	13.000.000	-	13.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	9.805.000	50.195.000,00	16,34
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	32.240.000	167.760.000,00	16,12
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.000.000	5.010.000	36.990.000,00	11,93

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
II.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**12.827.000.000**	**206.722.382**	**12.620.277.618**	**1,61**
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**170.000.000**	**16.642.430**	**153.357.570**	**9,79**
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	120.000.000	14.953.570	105.046.430,00	12,46
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	50.000.000	1.688.860	48.311.140,00	3,38
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**112.000.000**	**1.829.850**	**110.170.150**	**1,63**
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarekawan Tanggap Bencana	112.000.000	1.829.850	110.170.150,00	1,63
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**10.963.000.000**	**128.713.745**	**10.834.286.255**	**1,17**
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.635.000.000	25.192.535	1.609.807.465,00	1,54
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	4.008.000.000	26.169.710	3.981.830.290,00	0,65
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang terdampak Relokasi Program Provinsi	5.320.000.000	77.351.500	5.242.648.500,00	1,45
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**1.582.000.000**	**59.536.357**	**1.522.463.643**	**3,76**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Provinsi	1.582.000.000	59.536.357	1.522.463.643,00	3,76
III.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**2.024.023.000**	**194.654.000**	**1.829.369.000**	**9,62**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**155.000.000**	**22.979.000**	**132.021.000**	**14,83**
	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	155.000.000	22.979.000	132.021.000,00	14,83
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**1.869.023.000**	**171.675.000**	**1.697.348.000**	**9,19**
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	14.520.000	1.424.000	13.096.000,00	9,81
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	171.950.000	6.216.500	165.733.500,00	3,62
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	1.682.553.000	164.034.500	1.518.518.500,00	9,75
IV.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**2.663.000.000**	**7.718.000**	**2.655.282.000**	**0,29**
	Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Permukiman	**2.663.000.000**	**7.718.000**	**2.655.282.000**	**0,29**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	25.000.000	795.000	24.205.000,00	3,18
	Sub Kegiatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	2.638.000.000	6.923.000	2.631.077.000,00	0,26
V.	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**272.000.000**	**40.917.000**	**231.083.000**	**15,04**
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	**272.000.000**	**40.917.000**	**231.083.000**	**15,04**
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	272.000.000	40.917.000	231.083.000,00	15,04
VI.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**503.000.000**	**59.285.000**	**443.715.000**	**11,79**
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**503.000.000**	**59.285.000**	**443.715.000**	**11,79**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	378.000.000	41.774.000	336.226.000,00	11,05
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	125.000.000	17.511.000	107.489.000,00	14,01
VII.	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**433.000.000**	**42.856.000**	**390.144.000**	**9,90**
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupataen/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**433.000.000**	**42.856.000**	**390.144.000**	**9,90**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	368.000.000	33.074.000	334.926.000,00	8,99
	Sub Kegiatan Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	65.000.000	9.782.000	55.218.000,00	15,05

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
VIII.	**PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**370.000.000**	**42.476.800**	**327.523.200**	**11,48**
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Ulitilas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	**370.000.000**	**42.476.800**	**327.523.200**	**11,48**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkonisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kialifikasi Menengah	370.000.000	42.476.800	327.523.200,00	11,48
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**1.227.300.000**	**56.636.482**	**1.170.663.518**	**4,61**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**1.227.300.000**	**56.636.482**	**1.170.663.518**	**4,61**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	735.000.000	25.779.982	709.220.018,00	3,51
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	492.300.000	30.856.500	461.443.500,00	6,27
JUMLAH		**39.810.871.000**	**3.418.924.526**	**36.391.946.474**	**8,59**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

BULAN JANUARI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Bulan Januari pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Januari 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Boedyo Dharmawan, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 199803 1 003

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2026 bulan Januari sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, Januari 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Boedyo Dharmawan, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 199803 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntanbilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntanbilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen

   Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan

   Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.31/508 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2026 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja Murni sebesar Rp. 39.810.871.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 39.495.871.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 315.000.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 19 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Tujuan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah **"Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Lestari"** dengan 4 (empat) sasaran yaitu :

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis
2. Perekonomian Tangguh yang Berdaya saing dan Berkelanjutan
3. SDM Berdaya Saing, Berkarakter dan Adaptif
4. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Gubernur pada periode perencanaan jangka menengah transisi 2024-2026 serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Kawasan Permukiman;
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
4. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;

6. Program Redistrubusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2026
periode 1 Januari s.d 31 Januari 2026

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	**BELANJA DAERAH**	**39.810.871.000**	**1.498.040.047**	**3,76**	**38.312.830.953**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**39.495.871.000**	**1.498.040.047**	**3,79**	**37.997.830.953**
5.1.1	Belanja Pegawai	13.368.944.000	908.542.687	6,80	12.460.401.313
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.039.412.000	414.046.535	6,86	5.625.365.465
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.455.700.000	310.496.400	6,97	4.145.203.600
5.1.1.1.1.1	**Belanja Gaji Pokok PNS**	**3.638.000.000**	**253.521.200**	**6,97**	**3.384.478.800**
5.1.1.1.1.2	**Belanja Gaji Pokok PPPK**	**817.700.000**	**56.975.200**	**6,97**	**760.724.800**
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	381.000.000	26.525.940	6,96	354.474.060
5.1.1.1.2.1	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**	**343.500.000**	**23.933.468**	**6,97**	**319.566.532**
5.1.1.1.2.2	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**	**37.500.000**	**2.592.472**	**6,91**	**34.907.528**
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	176.540.000	12.610.000	7,14	163.930.000
5.1.1.1.3.1	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**	**176.540.000**	**12.610.000**	**7,14**	**163.930.000**
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	135.500.000	9.100.000	6,72	126.400.000
5.1.1.1.4.1	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**	**100.000.000**	**6.590.000**	**6,59**	**93.410.000**
5.1.1.1.4.2	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**	**35.500.000**	**2.510.000**	**7,07**	**32.990.000**
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	85.500.000	6.085.000	7,12	79.415.000
5.1.1.1.5.1	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**	**85.500.000**	**6.085.000**	**7,12**	**79.415.000**
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	220.000.000	15.208.200	6,91	204.791.800
5.1.1.1.6.1	**Belanja Tunjangan Beras PNS**	**185.000.000**	**12.963.180**	**7,01**	**172.036.820**
5.1.1.1.6.2	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**	**35.000.000**	**2.245.020**	**6,41**	**32.754.980**
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	96.800.000	447.742	0,46	96.352.258
5.1.1.1.7.1	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**	**96.800.000**	**447.742**	**0,46**	**96.352.258**
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	400.000	4.029	1,01	395.971
5.1.1.1.8.1	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**	**300.000**	**3.444**	**1,15**	**296.556**
5.1.1.1.8.2	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**	**100.000**	**585**	**0,59**	**99.415**
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	380.000.000	30.588.459	8,05	349.411.541
5.1.1.1.9.1	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**	**335.000.000**	**27.565.354**	**8,23**	**307.434.646**
5.1.1.1.9.2	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**	**45.000.000**	**3.023.105**	**6,72**	**41.976.895**
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.500.000	745.187	7,84	8.754.813
5.1.1.1.10.1	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**	**7.500.000**	**608.441**	**8,11**	**6.891.559**
5.1.1.1.10.2	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**	**2.000.000**	**136.746**	**6,84**	**1.863.254**
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.000.000	2.235.578	8,28	24.764.422
5.1.1.1.11.1	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**	**22.000.000**	**1.825.356**	**8,30**	**20.174.644**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.1.11.2	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**	**5.000.000**	**410.222**	**8,20**	**4.589.778**
5.1.1.1.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	71.472.000	0	0	71.472.000
5.1.1.1.12.1	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**	**56.684.000**	**0**	**0**	**56.684.000**
5.1.1.1.12.2	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK**	**14.788.000**	**0**	**0**	**14.788.000**
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.329.532.000	494.496.152	6,75	6.835.035.848
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.329.532.000	494.496.152	6,75	6.835.035.848
5.1.1.2.1.1	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**	**6.989.532.000**	**480.996.152**	**6,88**	**6.508.535.848**
5.1.1.2.1.2	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**	**340.000.000**	**13.500.000**	**3,97**	**326.500.000**
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.126.927.000	589.497.360	3,66	15.537.429.640
5.1.2.1	Belanja Barang	6.885.553.000	282.398.825	4,10	6.603.154.175
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	6.778.353.000	282.398.825	4,17	6.495.954.175
5.1.2.1.1.4	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**	**100.000.000**	**8.980.000**	**8,98**	**91.020.000**
5.1.2.1.1.9	**Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran**	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**
5.1.2.1.1.12	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**	**55.000.000**	**0**	**0**	**55.000.000**
5.1.2.1.1.24	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**	**263.709.000**	**83.361.825**	**31,61**	**180.347.175**
5.1.2.1.1.26	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**	**390.426.000**	**7.905.000**	**2,02**	**382.521.000**
5.1.2.1.1.27	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**	**11.800.000**	**5.000.000**	**42,37**	**6.800.000**
5.1.2.1.1.31	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**	**33.000.000**	**33.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.1.35	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**	**15.600.000**	**0**	**0**	**15.600.000**
5.1.2.1.1.36	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**	**10.000.000**	**9.520.000**	**95,20**	**480.000**
5.1.2.1.1.39	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**	**208.000.000**	**0**	**0**	**208.000.000**
5.1.2.1.1.40	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**	**3.487.698.000**	**0**	**0**	**3.487.698.000**
5.1.2.1.1.52	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**	**2.164.420.000**	**134.261.000**	**6,20**	**2.030.159.000**
5.1.2.1.1.53	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**	**34.200.000**	**371.000**	**1,08**	**33.829.000**
5.1.2.1.1.64	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**	**1.500.000**	**0**	**0**	**1.500.000**
5.1.2.1.4	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	107.200.000	0	0	107.200.000
5.1.2.1.4.117	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**	**22.200.000**	**0**	**0**	**22.200.000**
5.1.2.1.4.137	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-**	**25.000.000**	**0**	**0**	**25.000.000**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Alat Studio Lainnya				
5.1.2.1.4.411	**Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**	**60.000.000**	**0**	**0**	**60.000.000**
5.1.2.2	Belanja Jasa	6.407.450.000	242.544.535	3,79	6.164.905.465
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	5.225.778.000	242.544.535	4,64	4.983.233.465
5.1.2.2.1.3	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**	**641.300.000**	**33.600.000**	**5,24**	**607.700.000**
5.1.2.2.1.4	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**	**17.100.000**	**0**	**0**	**17.100.000**
5.1.2.2.1.6	**Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**	**2.500.000**	**0**	**0**	**2.500.000**
5.1.2.2.1.25	**Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan**	**7.200.000**	**300.000**	**4,17**	**6.900.000**
5.1.2.2.1.29	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**	**1.172.313.000**	**0**	**0**	**1.172.313.000**
5.1.2.2.1.30	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**	**552.500.000**	**43.153.560**	**7,81**	**509.346.440**
5.1.2.2.1.31	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**	**709.800.000**	**54.284.200**	**7,65**	**655.515.800**
5.1.2.2.1.33	**Belanja Jasa Tenaga Supir**	**50.700.000**	**0**	**0**	**50.700.000**
5.1.2.2.1.34	**Belanja Jasa Tenaga Juru Masak**	**101.400.000**	**0**	**0**	**101.400.000**
5.1.2.2.1.46	**Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi**	**150.000.000**	**0**	**0**	**150.000.000**
5.1.2.2.1.59	**Belanja Tagihan Telepon**	**52.500.000**	**3.349.006**	**6,38**	**49.150.994**
5.1.2.2.1.60	**Belanja Tagihan Air**	**24.000.000**	**3.168.792**	**13,20**	**20.831.208**
5.1.2.2.1.61	**Belanja Tagihan Listrik**	**423.500.000**	**29.060.886**	**6,86**	**394.439.114**
5.1.2.2.1.67	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**	**31.050.000**	**0**	**0**	**31.050.000**
5.1.2.2.1.80	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**	**378.000.000**	**0**	**0**	**378.000.000**
5.1.2.2.1.81	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**	**8.000.000**	**0**	**0**	**8.000.000**
5.1.2.2.1.90	**Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional**	**903.915.000**	**75.628.091**	**8,37**	**828.286.909**
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	155.000.000	0	0	155.000.000
5.1.2.2.2.8	**Belanja Asuransi Barang Milik Daerah**	**155.000.000**	**0**	**0**	**155.000.000**
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.000.000	0	0	30.000.000
5.1.2.2.4.36	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**	**30.000.000**	**0**	**0**	**30.000.000**
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	44.000.000	0	0	44.000.000
5.1.2.2.5.25	**Belanja Sewa Bangunan Terbuka**	**44.000.000**	**0**	**0**	**44.000.000**
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	455.672.000	0	0	455.672.000
5.1.2.2.8.9	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi**	**258.698.000**	**0**	**0**	**258.698.000**
5.1.2.2.8.20	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi**	**196.974.000**	**0**	**0**	**196.974.000**
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	490.000.000	0	0	490.000.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.9.14	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**	**490.000.000**	**0**	**0**	**490.000.000**
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.000.000	0	0	7.000.000
5.1.2.2.12.1	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**	**7.000.000**	**0**	**0**	**7.000.000**
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	491.145.000	0	0	491.145.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	291.145.000	0	0	291.145.000
5.1.2.3.2.22	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set**	**14.500.000**	**0**	**0**	**14.500.000**
5.1.2.3.2.23	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa**	**5.300.000**	**0**	**0**	**5.300.000**
5.1.2.3.2.36	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**	**258.345.000**	**0**	**0**	**258.345.000**
5.1.2.3.2.118	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel**	**13.000.000**	**0**	**0**	**13.000.000**
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000	0	0	200.000.000
5.1.2.3.3.1	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**	**200.000.000**	**0**	**0**	**200.000.000**
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	2.342.779.000	64.554.000	2,76	2.278.225.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.342.779.000	64.554.000	2,76	2.278.225.000
5.1.2.4.1.1	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**	**2.342.779.000**	**64.554.000**	**2,76**	**2.278.225.000**
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000
5.1.6.1.2.1	**Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**	**10.000.000.000**	**0**	**0**	**10.000.000.000**
5.2	**BELANJA MODAL**	**315.000.000**	**0**	**0**	**315.000.000**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.000.000	0	0	65.000.000
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	50.000.000	0	0	50.000.000
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	50.000.000	0	0	50.000.000
5.2.2.5.2.4	**Belanja Modal Alat Pendingin**	**50.000.000**	**0**	**0**	**50.000.000**
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	15.000.000	0	0	15.000.000
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	15.000.000	0	0	15.000.000
5.2.2.10.2.4	**Belanja Modal Peralatan Jaringan**	**15.000.000**	**0**	**0**	**15.000.000**
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000	0	0	250.000.000
5.2.6.1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	250.000.000	0	0	250.000.000
5.2.6.1.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	250.000.000	0	0	250.000.000
5.2.6.1.1.5	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software**	**250.000.000**	**0**	**0**	**250.000.000**
	Jumlah Belanja	**39.810.871.000**	**1.498.040.047**	**3,76**	**38.312.830.953**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Surplus/(Defisit)	**0**	**(1.498.040.047)**	**100**	**1.498.040.047**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**	**(1.498.040.047)**	**100**	**1.498.040.047**

Semarang, 31 Januari 2026

PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(MUSLICHAH SETIASIH, M.Eng., MMG, S.IP)

NIP. 19800901 201001 2 018

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 39.810.871.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 39.495.871.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. serta Belanja Modal sebesar Rp. 315.000.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 13.368.944.000,- dan realisasi sebesar Rp. 908.542.687,- dengan Presentasi 6.80 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 16.126.927.000,- dan realisasi sebesar Rp. 589.497.360,- dengan Presentasi 3.66 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0 %.

Belanja Modal *:*

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 315.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0%; dan Belanja Modal Aset Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0%.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut , strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Fungsi :

Sub Fungsi :

Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	**39.810.871.000**	**1.498.040.047**	**38.312.830.953**	**3,76**
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**	**19.491.548.000**	**1.238.413.222**	**18.253.134.778**	**6,35**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**774.389.000**	**16.695.000**	**757.694.000**	**2,16**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	452.234.000	10.335.000	441.899.000,00	2,29
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	292.155.000	6.360.000	285.795.000,00	2,18
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	15.000.000	-	15.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	15.000.000	-	15.000.000,00	-
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**13.844.944.000**	**919.887.687**	**12.925.056.313**	**6,64**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	13.368.944.000	908.542.687	12.460.401.313,00	6,80
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	386.000.000	-	386.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	-	50.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	-	5.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunanan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	30.000.000	9.030.000	20.970.000,00	30,10
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	2.315.000	2.685.000,00	46,30
	Kegiatan Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**170.000.000**	**-**	**170.000.000**	**0**
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	-	5.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	-	155.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	-	5.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	-	5.000.000,00	-
	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**62.305.000**	**-**	**62.305.000**	**0**
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	-	10.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.000.000	-	15.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	-	10.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11.641.000	-	11.641.000,00	-
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.664.000	-	15.664.000,00	-
	Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	**1.115.000.000**	**87.886.000**	**1.027.114.000**	**7,88**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	33.000.000	33.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000	28.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.000.000	9.520.000	3.480.000,00	73,23
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	8.980.000	91.020.000,00	8,98
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000	-	12.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	78.000.000	371.000	77.629.000,00	0,48
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	630.000.000	3.445.000	626.555.000,00	0,55
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21.000.000	4.570.000	16.430.000,00	21,76
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.000.000	-	200.000.000,00	-
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**90.000.000**	**-**	**90.000.000**	**0**
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000	-	90.000.000,00	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2.830.515.000**	**213.944.535**	**2.616.570.465**	**7,56**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000	35.578.684	464.421.316,00	7,12
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.325.515.000	173.365.851	2.152.149.149,00	7,45
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**604.395.000**	**-**	**604.395.000**	**0**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.395.000	-	89.395.000,00	-
	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	-	200.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	13.000.000	-	13.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	-	60.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	-	200.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.000.000	-	42.000.000,00	-

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
II.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**12.827.000.000**	**56.805.025**	**12.770.194.975**	**0,44**
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**170.000.000**	**5.412.430**	**164.587.570**	**3,18**
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	120.000.000	3.723.570	116.276.430,00	3,10
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	50.000.000	1.688.860	48.311.140,00	3,38
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**112.000.000**	**1.829.850**	**110.170.150**	**1,63**
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarekawan Tanggap Bencana	112.000.000	1.829.850	110.170.150,00	1,63
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**10.963.000.000**	**33.331.745**	**10.929.668.255**	**0,30**
	Sub Kegiatan Rehabiltasi Rumah bagi Korban Bencana	1.635.000.000	9.688.535	1.625.311.465,00	0,59
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	4.008.000.000	5.867.210	4.002.132.790,00	0,15
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang terdampak Relokasi Program Provinsi	5.320.000.000	17.776.000	5.302.224.000,00	0,33
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**1.582.000.000**	**16.231.000**	**1.565.769.000**	**1,03**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Provinsi	1.582.000.000	16.231.000	1.565.769.000,00	1,03
III.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**2.024.023.000**	**123.382.000**	**1.900.641.000**	**6,10**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**155.000.000**	**14.560.000**	**140.440.000**	**9,39**
	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	155.000.000	14.560.000	140.440.000,00	9,39
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**1.869.023.000**	**108.822.000**	**1.760.201.000**	**5,82**
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	14.520.000	-	14.520.000,00	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	171.950.000	-	171.950.000,00	-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	1.682.553.000	108.822.000	1.573.731.000,00	6,47
IV.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**2.663.000.000**	**1.140.000**	**2.661.860.000**	**0,04**
	Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Permukiman	**2.663.000.000**	**1.140.000**	**2.661.860.000**	**0,04**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	25.000.000	-	25.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	2.638.000.000	1.140.000	2.636.860.000,00	0,04
V.	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**272.000.000**	**16.711.000**	**255.289.000**	**6,14**
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	**272.000.000**	**16.711.000**	**255.289.000**	**6,14**
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	272.000.000	16.711.000	255.289.000,00	6,14
VI.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**503.000.000**	**15.297.000**	**487.703.000**	**3,04**
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**503.000.000**	**15.297.000**	**487.703.000**	**3,04**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	378.000.000	8.591.000	369.409.000,00	2,27
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	125.000.000	6.706.000	118.294.000,00	5,36
VII.	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**433.000.000**	**22.139.000**	**410.861.000**	**5,11**
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupataen/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**433.000.000**	**22.139.000**	**410.861.000**	**5,11**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	368.000.000	14.417.000	353.583.000,00	3,92
	Sub Kegiatan Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	65.000.000	7.722.000	57.278.000,00	11,88

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
VIII.	**PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**370.000.000**	**12.452.500**	**357.547.500**	**3,37**
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Ulitilas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	**370.000.000**	**12.452.500**	**357.547.500**	**3,37**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkonisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kialifikasi Menengah	370.000.000	12.452.500	357.547.500,00	3,37
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**1.227.300.000**	**11.700.300**	**1.215.599.700**	**0,95**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**1.227.300.000**	**11.700.300**	**1.215.599.700**	**0,95**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	735.000.000	4.251.800	730.748.200,00	0,58
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	492.300.000	7.448.500	484.851.500,00	1,51
JUMLAH		**39.810.871.000**	**1.498.040.047**	**38.312.830.953**	**3,76**